



RENSTRA

RENCANA STRATEGIS

**DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
KABUPATEN MUSI RAWAS
2016 - 2021**



KATA PENGANTAR

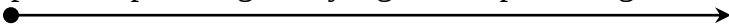
Sesungguhnya segala puji dan syukur hanya kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan dan kenyamanan kepada kita sehingga kita dapat menunaikan perintahNya serta diberikan kesempatan sebagai abdi negara untuk melayani masyarakat, sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan umat manusia.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Rawas tahun 2016-2021, Alhamdulillah Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 - 2021 telah dapat diselesaikan sesuai dengan target waktu.

Kebijakan Pembangunan pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Musi Rawas mutlak dilakukan melalui program-program yang tepat, jelas dan terarah sesuai dengan Visi dan Misi, Rencana Strategis serta aspirasi masyarakat melalui musrenbang tingkat desa/kelurahan dan kecamatan sehingga pelaksanaan pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Musi Rawas dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Secara umum RENSTRA Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik tahun 2016 - 2021 memuat keseluruhan kebijakan publik di lingkungan dinas dan secara khusus membahas kebijakan publik sektor komunikasi informatika dan statistik yang terkait dengan APBD yang disusun berdasarkan alokasi kebutuhan pendanaan yang tertampung dalam RPJMD Tahun 2016 – 2021.

Secara rinci RENSTRA Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Tahun 2016 - 2021 berisi informasi kemajuan yang telah dicapai, masalah serta tantangan dan peluang yang akan dihadapi pada masing-masing bidang urusan di lingkungan dinas. Dari telaahan tersebut kemudian dirumuskan sasaran pembangunan yang ingin dicapai serta prioritas pembangunan yang akan dipilih dengan mengacu pada agenda pembangunan yang





DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
KABUPATEN MUSI RAWAS

perlu diselesaikan dalam kurun waktu 2016 -2021. Dengan arah kebijakan pada masing masing bidang, yang meliputi bidang Pengelolaan Komunikasi Publik, bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi, bidang Layanan e-Government dan bidang Statistik & Persandian.

Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021 ini berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan publik.

Selanjutnya dengan tersusunnya Rencana Strategis ini, maka kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu.

Muara Beliti, MARET 2018

KEPALA DINAS KOMUNIKASI
INFORMATIKA DAN STATISTIK
KABUPATEN MUSI RAWAS

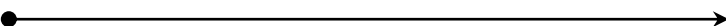


BAMBANG HERMANTO, SE, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19620109 199003 1 003



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	7
1.4. Sistematika Penulisan	8
BAB II : GAMBARAN UMUM PELAYANAN PERANGKAT DAERAH (PD)	
2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi PD.....	10
2.2. Sumber Daya PD	15
2.3. Kinerja Pelayanan PD.....	18
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD.....	24
BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI	
3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan PD ...	26
3.2. Telaahan Visi, Misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah..	26
3.3. Telaahan Rencana K/L Renstra Propinsi.....	33
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian KLHS	43
3.4. Penentuan Isu-isu Strategis	46
BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN	
4.1. Tujuan Jangka Menengah.....	49
4.2. Sasaran Jangka Menengah.....	50





BAB V	: STRATEGI DAN KEBIJAKAN	
5.1.	Strategi	53
5.2.	Kebijakan	54
BAB VI	: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	
6.1.	Rencana Program dan Kegiatan	57
6.2.	Indikator Pendanaan	61
BAB VII	: KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	65
BAB VIII	: PENUTUP.....	67





DAFTAR TABEL

1.	Tabel II.1	Jumlah SDM menurut Golongan	16
2.	Tabel II.2	Jumlah SDM menurut Jabatan	16
3.	Tabel II.3	Jumlah SDM menurut Pendidikan	16
4.	Tabel II.4	Daftar Kepegawaian	17
5.	Tabel II.5	Asset Dinas Kominfo	17
6.	Tabel II.6	Jumlah Jaringan Telepon Seluler.....	20
7.	Tabel II.7	Penerimaan PAD	26
8.	Tabel II.8	Data Pendanaan Anggaran	26
9.	Tabel II.9	Capaian Indikator Kinerja Kunci	27
10.	Tabel II.10	Capaian Indikator Kinerja Utama	27
11.	Tabel II.11	Capaian Sasaran strategis	28
12.	Tabel III.1	Sasaran Strategis/IKS Kementerian Kominfo.....	37
13.	Tabel III.2	Hasil Telaahan Struktural Ruang Wilayah	45
14.	Tabel .III.3	Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah	45
15.	Tabel IV.1	Tujuan dan Sasaran.....	50
16.	Tabel V.1	Strategi dan Kebijakan	55
17.	Tabel VII.1	Indikator Kinerja Kelompok Sasaran	66



DAFTAR GAMBAR

1.	Gambar I.1	Bagan Alur Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Renstra SKPD.....	2
2.	Gambar I.2	Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.....	3
3.	Gambar I.3	Pola Pikir Penyusunan Renstra	4
4.	Gambar II.1	Struktur Organisasi Diskominfo dan Statistik.....	15

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 - 2021 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) untuk periode lima tahun, yang disusun guna menyediakan dokumen perencanaan lima tahunan yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja PD) yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Musi Rawas, sehingga Renstra PD pada dasarnya merupakan penjabaran dari RPJMD dan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Fungsi Renstra PD adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi PD yang memuat *visi, misi, tujuan, kebijakan, program* dan *kegiatan* pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang bersifat *indikatif*.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 secara tegas menetapkan keberadaan Daerah Otonom, yang penyelenggaraannya secara bulat dan utuh dilaksanakan di daerah Kabupaten dan Kota. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri serta berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik tercermin dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban instansi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggung jawaban yang dilaksanakan secara periodik melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Musi Rawas sebagai salah satu instansi

Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang tugasnya membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang Komunikasi Informatika dan Statistik, berkewajiban juga menyusun Rencana Strategis.

Dengan demikian diharapkan agar dapat menentukan arah perkembangan dalam meningkatkan kinerjanya, yang mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal regional, nasional, maupun global.

Rencana strategis yang disusun oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Musi Rawas merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat tersebut di atas, yang dalam penyusunannya perlu melaksanakan analisis terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal yang merupakan langkah penting dengan memperhitungkan kekuatan (strengths), kelemahan (weakness), peluang (opportunities), dan tantangan (threats) yang ada. Rencana ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun, dengan tetap memperhatikan potensi yang ada.

Gambar I.1.
Bagan Alir tahapan dan tatacara penyusunan Renstra PD



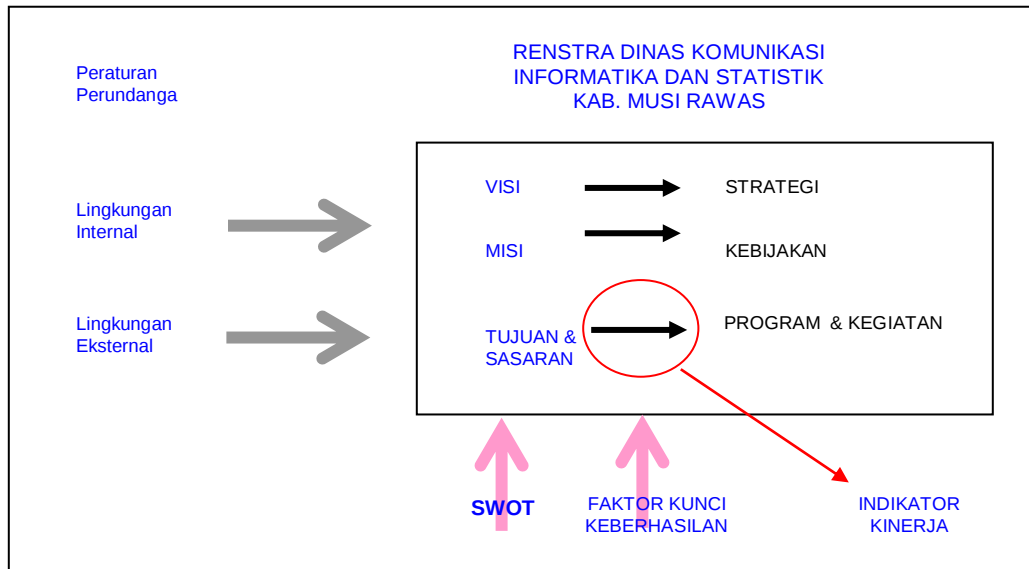
Keterkaitan Renstra Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik dengan RPJMD Kabupaten, RPMJD Provinsi dan Nasional, Renstra Dinas Komunikasi Informatika Provinsi Sumsel, pada pelaksanaannya akan diimplementasikan dalam Rencana Kerja PD.

Gambar I.2



Pola pikir penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Musi Rawas ditampilkan pada Gambar berikut ini.

Gambar I.3.
POLA PIKIR PENYUSUNAN RENCANA DAN STRATEGI



Alur pikir penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Musi Rawas dimulai dengan latar belakang permasalahan yang meliputi lingkungan internal dan lingkungan eksternal Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik saat ini, yang secara signifikan memberikan pengaruh serta peraturan perundangan-undangan sebagai landasan penyusunan. Terlihat pada gambar tersebut bahwa penyusunan rencana strategis tersebut harus diperhatikan beberapa aspek berpengaruh, yang meliputi peraturan perundangan terkait yang berlaku dan pengaruh lingkungan strategis. Pengaruh lingkungan strategis yang dimaksud dapat berupa implikasi dari perubahan atau pertumbuhan ekonomi suatu daerah dan dapat juga berupa dampak atas diberlakukannya peraturan perundangan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik adalah :

→
Renstra Diskominfo & Statistik Kab. Musi Rawas 2016-2021

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan kota Praja di Lingkungan Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821)
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang –undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 4700);
8. Undang-undang nomor: 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang –undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833)
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
16. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 14);
 20. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Selatan Tahun 2007 Nomor 17);
 21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018;
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas No. 7 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Musi Rawas Tahun 2005-2025(Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 Nomor 7);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Musi Rawas Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2013 Nomor 2);
 24. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021.
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10);
 26. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 68 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Musi Rawas.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renstra PD Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Musi Rawas adalah untuk memberikan arah kebijakan pembangunan bidang

komunikasi informatika dan statistik sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik, agar dapat berdaya guna dan berhasil guna.

Tujuan penulisan RENSTRA adalah :

- Sebagai landasan acuan dalam Penyusunan program dan kegiatan lima tahunan.
- Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
- Sebagai acuan dalam penilaian kinerja pembangunan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
- Sebagai tindak lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas.
- Pedoman untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan pemangku kepentingan (*stakeholders*).
- Alat organisasi dalam peningkatan koordinasi baik vertikal maupun horizontal antar unit kerja

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) PD Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021 mengacu kepada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PD

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi PD
- 2.2 Sumber Daya PD
- 2.3 Kinerja Pelayanan PD
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI



- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasar Tugas dan Fungsi Pelayanan PD
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu strategis
- BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGI, DAN KEBIJAKAN
 - 4.1 Visi dan Misi
 - 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
 - 4.3 Strategi dan Kebijakan
- BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
- BAB VI. INDIKATOR KINERJA PD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
- BAB VII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Musi Rawas merupakan salah satu Dinas Daerah dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Musi Rawas, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 68 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Musi Rawas yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintah Daerah dibidang Komunikasi Informatika dan Statistik.

Untuk melaksanakan tugas pokok Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Musi Rawas menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan bidang Komunikasi Informatika dan Statistik
- b. Perumumusan kebijakan teknis dan operasional bidang Komunikasi Informatika dan Statistik
- c. Pelaksanaan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum bidang Komunikasi Informatika dan Statistik.
- d. Pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang Komunikasi Informatika dan Statistik.
- e. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan bidang Komunikasi Informatika dan Statistik.
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai bidang tugas dan fungsinya.

2.1.1.1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi perkantoran, umum dan kepegawaian, perlengkapan, pengelolaan keuangan, serta koordinasi dan pembinaan penyusunan program dan kegiatan dinas.

Untuk melaksanakan tugasnya, sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan pada sekretariat;
- b. Pengkoordinasian perencanaan program dan kegiatan dinas;
- c. Pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian;
- d. Penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- e. Pelaksanaan ketatalaksanaan, kedisiplinan dan perpustakaan dinas;
- f. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya Sekretaris dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Sub Bagian dan beberapa orang staf yaitu:

- Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.
- Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset.
- Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

2.1.1.2 Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik

Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pengelolaan komunikasi publik.

Untuk melaksanakan tugasnya, bidang Pengelolaan Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan komunikasi dan media publik;
- b. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang pengelolaan komunikasi dan media publik;
- c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan komunikasi dan media publik;

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Seksi dan beberapa orang staf yaitu:

- Kepala Seksi Layanan Komunikasi Publik.
- Kepala Seksi Pengelolaan Kelompok Komunikasi Publik.
- Kepala Seksi Kemitraan Komunikasi Publik

2.1.1.3 Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi

Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasihug menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang infrastruktur dan teknologi, pengendalian, pengawasan infrastruktur TIK dan integrasi sistem informasi dan database;
- b. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang infrastruktur dan teknologi, pengendalian, pengawasan infrastruktur TIK dan integrasi sistem informasi dan database
- c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang infrastuktur dan teknologi, pengendalian, pengawasan infrastruktur TIK dan integrasi sistem informasi dan database
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang infrastruktur dan teknologi, pengendalian, pengawasan infrastruktur TIK dan integrasi sistem informasi dan database, dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Seksi dan beberapa orang staf yaitu:

- Kepala Seksi Infrastruktur dan Teknologi
- Kepala Seksi Pengendalian, Pengawasan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
- Kepala Seksi Integrasi Sistem Informasi dan Database

2.1.1.4 Bidang Layanan e-Government

Bidang Layanan e-Government mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Layanan e-Government.

Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Layanan e-Government menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan aplikasi, ekosistem dan tata kelola e-Government.
- b. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan aplikasi, ekosistem, dan tata kelola e-Government;
- c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan aplikasi, ekosistem dan tata kelola e-Government
- d. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan aplikasi, ekosistem, dan tata kelola e-Government
- e. Pelayanan filtering konten negatif
- f. Penetapan alokasi internet protocol dan numbering di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepala Bidang Layanan e-Government dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Seksi dan beberapa orang staf yaitu:

- Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi;.
- Kepala Seksi Pengembangan Ekosistem e-Government;
- Kepala Seksi Tata Kelola e-Government.

2.1.1.5 Bidang Statistik dan Persandian

Bidang Statistik dan Persandian mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang statistik dan persandian.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Statistik dan Persandian menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan data dan statistik serta bidang persandian;
- b. Penyiapan perumusan norma, standar, prosedur serta kriteria di bidang pengelolaan data dan statistik serta bidang persandian;
- c. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan data dan statistik serta bidang persandian;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan data dan statistik serta bidang persandian.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya Kepala Bidang Statistik dan Persandian dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Seksi dan beberapa orang staf yaitu:

- Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Statistik,;
- Kepala Seksi Persandian;
- Kepala Seksi Keamanan Data dan Informasi.

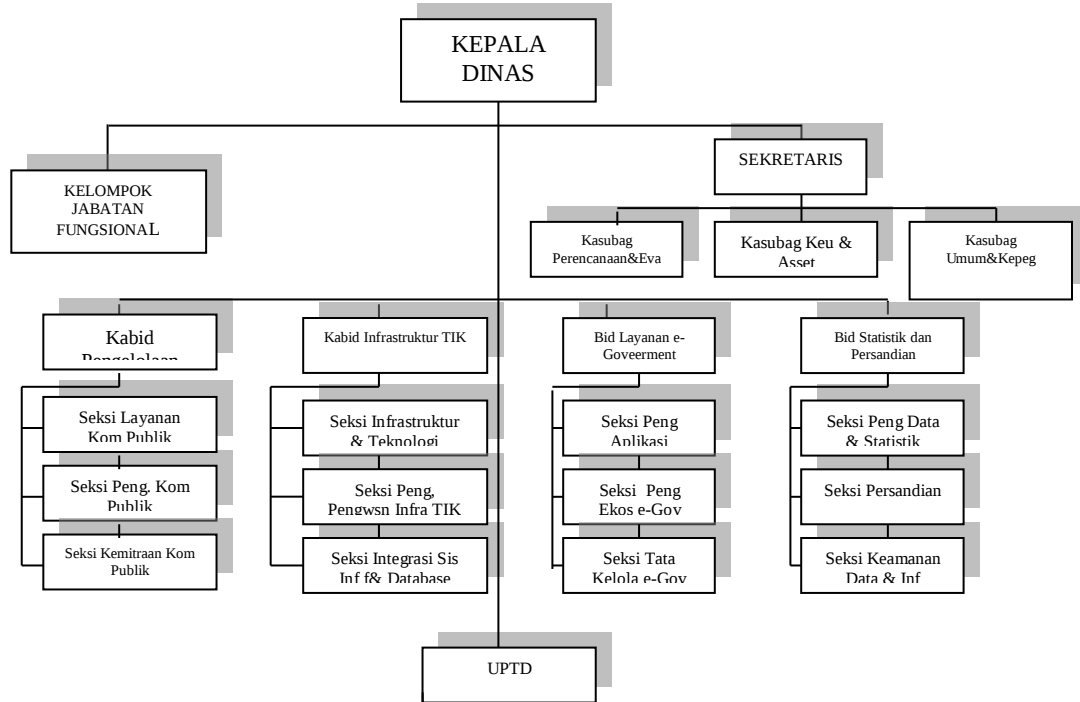
2.1.2. Tata Kerja

- a. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas dan Pimpinan Satuan Organisasi serta kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integritas dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar dinas/instansi lainnya.
- b. Setiap pimpinan Satuan Organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing, mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya, bila terjadi penyimpangan akan mengambil langkah-langkah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Setiap pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berjenjang.

2.1.3. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi sebagaimana gambar berikut :

Gambar : II. 1
STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
Perbup. No. 68 Tahun 2016



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Musi Rawas saat ini memiliki potensi sumber daya manusia yang handal sebagai modal atau suatu kekuatan pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Adapun sumber daya manusia sebagai potensi / kekuatan yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kab. Musi Rawas dapat dilihat di bawah ini :

2.2.1.1 Menurut Golongan

Tabel II. 1
SDM Menurut Golongan

Golongan	A	B	C	D	Jumlah Orang
I	-	-	-	-	-
II	1	2	2	1	6
III	4	7	4	10	25
IV	2	-	1	-	3
Jumlah ...					34

Sumber data: Sekretariat Diskominfo Statistik

2.2.1.2 Menurut Jabatan

Tabel II.2
SDM Menurut Jabatan

No	Jabatan	Jumlah (Orang)
1.	Eselon IIb (Kepala SKPD)	1 Org
2.	Eselon III a (Sekretaris)	1 Org
3.	Eselon III b (Kabid)	4 Org
4.	Eselon IVa (Kasi, KUPTD)	15 Org
5.	Eselon IVb (TU UPTD)	-
6.	Fungsional	-
Jumlah		21 Org

Sumber data : Sekretariat Diskominfo Statistik

2.2.1.3 Menurut Pendidikan

Tabel II.3
SDM Menurut Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah (Orang)
1.	S-3	-
2.	S-2	6 Org
3.	S-1 / D-IV	20 Org
4.	D-III	2 Org
5.	SLTA	6 Org
6.	SLTP	- Org
Jumlah.....		34 Org

Sumber data : Sekretariat Diskominfo Statistik

Tabel II. 4
Daftar Kepegawaian Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
Kabupaten Musi Rawas
Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Pangkat/Golongan Tahun 2016.

Tingkat Pendidikan	Pangkat/Gol (orang)													Jlh (org)
	IV	IIIId	IIIC	IIIB	IIIA	IIId	IIc	IIb	IIa	Id	Ic	Ib	Ia	
S3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S2	2	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
S1/D4	-	8	2	6	4	-	-	-	-	-	-	-	-	20
Akademi/DIII	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2
SLTA	-	1	-	1	-	-	1	2	1	-	-	-	-	6
SLTP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	2	10	4	8	4	1	2	2	1	-	-	-	-	34

Sumber data: DUK Diskominfo Statistik

2.2.2. Asset / Modal

Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Musi Rawas didukung oleh Sumber Daya asset / modal yang tercatat pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik sampai dengan 31 Desember 2015

Tabel II.5
Aset Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

No	Asset	Jumlah Satuan	Kondisi
1	Tanah / Bangunan - Gedung Kantor	16.000 M2	Baik
2	Kendaraan - Roda 4 - Roda 2	3 Unit -	Baik

3	Perlengkapan Barang Elektronik - Pesawat Telepon - Telepon Kantor - Telepon Mobile - Alat Komunikasi Lainnya (HT) - Laptop/notebook - Printer / Scanner - Peralatan LPSE - Peralatan Radio / studio	2 Buah 1 Buah 10 Buah 10 Unit 12 Unit 1 Paket 1 Paket	Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik
4	Perlengkapan Kantor - Meja Kerja Pejabat / Staf - Kursi Kerja Pejabat Staf - Meja Rapat - Kursi Rapat - Kursi Tamu	60 Buah 74 Buah 8 Buah 9 Buah 2 Stel	Baik Baik Baik Baik Baik

Sumber data: Sekretariat Diskominfo

2.3. Kinerja Pelayanan PD

2.3.1. Pelayanan PD

Dalam hal pelayanan SKPD periode 2010 – 2016, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik belum terbentuk dan urusan Komunikasi Informatika masih termasuk dalam urusan pilihan pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, namun setelah dikeluarkannya Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 68 Tanggal 28 November Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik, maka sejak dikeluarkannya Peraturan Bupati tersebut Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik menjadi Perangkat Daerah tersendiri yang menjalankan urusan komunikasi dan informatika, statistik dan persandian. Sebagai bagian dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Rawas Bidang Kominfo sebagai penyelenggara urusan komunikasi dan informatika telah melaksanakan realisasi kegiatan pembangunan dan pengembangan sebagai berikut :

1. Pengenalan IT bagi para siswa/ siswi melalui MCAP.
2. Bantuan sarana komunikasi bagi Komunitas Informasi Masyarakat (KIM).
3. Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah kepada masyarakat melalui Website, siaran radio, baliho, spanduk, siaran televisi dan jasa muatan berita koran.

4. Penyelenggaraan Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE).
5. Pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
6. Bantuan Bandwidth untuk pelayanan internet gratis.
7. Pengembangan jaringan Website PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
8. Fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa secara elektronik (*E-Voting*).
9. Perencanaan pembangunan Media Center.
10. Melakukan kerjasama dengan pihak ketiga, instansi terkait dan lintas sektoral.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Musi Rawas diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Musi Rawas melalui strategi, program dan kegiatan, dengan berpedoman kepada RPJMN dan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan. Banyak parameter yang dapat dijadikan tolok ukur kinerja pembangunan bidang komunikasi dan informatika, baik bersifat kualitatif maupun kuantitatif termasuk penilaian kepuasan masyarakat terhadap pelayanan komunikasi dan informasi.

Potensi dan kondisi sektor Komunikasi Informatika dan Statistik terdiri dari :

a. Radio Agropolitan

Radio Agropolitan sudah beroperasi sejak tahun....., dimana gelombang Radio Agropolitan berada pada 97,1 FM. Siaran Radio Agropolitan menyampaikan informasi-informasi penting seputar Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di Kabupaten Musi Rawas.

b. Mobile Community Access Point (M-CAP) 1 Unit

Mobile Community Access Point (M-CAP) digunakan untuk melaksanakan sosialisasi kepada pelajar di sekolah-sekolah dalam wilayah Kabupaten Musi Rawas tentang penggunaan internet dan jaringannya.

c. Unit Layanan Internet Gratis dengan Kapasitas 30 Mbps

d. Website Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dengan alamat www.musirawaskab.go.id

e. Unit Layanan LPSE sebagai penyelenggara proses Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik

f. Fasilitas E-Voting 16 Unit.

Tabel II.6
Jumlah Jaringan Telepon Seluler / Stasioner menurut Kecamatan
di Kabupaten Musi Rawas

No.	Kecamatan	Jumlah Stasioner	Keterangan
1.	STL Ulu	10	PT. Telkomsel (2) PT. Indosat (1) PT. Daya Mitra Telekomunikasi (1) PT. Tower B.G (3) PT. XL (3)
2.	Selangit	6	PT. Telkomsel (2) PT. XL (1) PT. Daya Mitra Telekomunikasi (1) PT. Tower B.G (2)
3.	Sumber Harta	4	PT. Telkomsel (1) PT. XL (1) PT. Protelindo (1) PT. Tower B.G (1)
4.	Tugumulyo	8	PT. Telkomsel (2) PT. Indosat (2) PT. XL (2) PT. Daya Mitra Telekomunikasi (1) PT. Protelindo (1)
5.	Purwodadi	4	PT. Telkomsel (1) PT. XL (1) PT. Tower B.G (2)
6.	Muara Beliti	8	PT. Telkomsel (2) PT. Indosat (1) PT. XL (2) PT. STI Ceria (1) PT. Protelindo (1) PT. Tower B.G (1)
7.	TP. Kepungut	6	PT. Telkomsel (2) PT. Tower B.G (3) PT. XL (1)
8.	Jayaloka	5	PT. Telkomsel (2) PT. Daya Mitra Telekomunikasi (1) PT. XL (1) PT. Tower B.G (1)
9.	Suka Karya	3	PT. Telkomsel (1) PT. XL (1) PT. Protelindo (1)
10.	Muara Kelingi	9	PT. Telkomsel (4) PT. Indosat (1)

			PT. XL (2) PT. Corona (1) PT. Tower B.G (1)
11.	BTS Ulu	8	PT. Telkomsel (2) PT. Daya Mitra Telekomunikasi (1) PT. XL (2) PT. Protelindo (1) PT. Medco (2)
12.	Tuah Negeri	8	PT. Telkomsel (1) PT. XL (4) PT. Tower B.G (3)
13.	Muara Lakitan	10	PT. Telkomsel (4) PT. Indosat (2) PT. XL (2) PT. STI Ceria (1) PT. Tower B.G (1)
14.	Megang Sakti	16	PT. Telkomsel (4) PT. Indosat (1) PT. Daya Mitra Telekomunikasi (1) PT. XL (4) PT. Corona (1) PT. Protelindo (2) PT. Tower B.G (3)
	Jumlah	105	

Sumber data : Musi Rawas dalam angka 2015

2.3.2 Pendapatan Retribusi

Bidang Komunikasi dan Informatika mengelola pungutan retribusi daerah yaitu :

1. Retribusi Jasa Usaha
 - Retribusi Penegendalian Menara Telekomunikasi
2. Retribusi Perizinan Tertentu
 - Izin Mendirikan Tower

Pendapatan Asli Daerah melalui retribusi yang dikelola oleh Bidang Kominfo Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Rawas selama kurun waktu 2010 sampai dengan 2015 disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel II.7

Penerimaan PAD Bidang Komunikasi dan Informatika Kab. Musi Rawas 2010-2015

No	URAIAN	2010		2011		2012		2013		2014		2015	
		Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH												
	HASIL RETRIBUSI DAERAH												
	RETRIBUSI JASA USAHA												
	- Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi							560.000.000	187	516.113.900	172	921.777.780	108
	RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU												
	- Izin mendirikan Tower			3.810.000	30								

Tabel II.8

DATA PENDANAAN ANGGARAN

Bidang Komunikasi dan Informatika TAHUN 2010 – 2015

No	Kode Rekening	Program	Anggaran Pendanaan Program per Tahun					
			2010	2011	2012	2013	2014	2015
		Belanja Langsung	18.903.987.000	11.792.077.000	11.811.552.000	15.546.949.000	9.600.000.000	8.848.681.700
	1.25.1.07.01.15.	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	545.130.000	611.750.000	976.592.000	945.513.500	1.462.000.000	1.713.082.000
	1.25.1.07.01.17.	Program Fasillitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	-	117.000.000	-	75.000.000	-	-
	1.25.1.07.01.18.	Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media	-	-	400.000.000	400.000.000	-	250.000.000

2.3.3. Pencapaian Kinerja

Sebagai unsur pelaksana teknis yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika, maka capaian kinerja dari seorang Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah ditentukan pada kemampuan menyusun dan mengimplementasikan kebijakan daerah di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika, serta tugas-tugas lainnya dengan mengacu pada capaian indikator kinerja dari Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD.

Perbandingan capaian dan realisasi indikator kinerja dari table diatas dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabl II.9
Capaian Indikator Kunci

No	Indikator Kinerja	Satuan	2011		2012		2013		2014		Capaian (%)
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
KOMUNKASI DAN INFORMATIKA											
1.	Jumlah Jaringan Komunikasi	bh	5	4	5	4	5	4	5	4	0.80
2.	Jumlah Wartel/Warnet Terhadap Penduduk	bh	1	-	1	-	1	-	1	-	0.00
3.	Jumlah Surat Kabar Nasional /Lokal	kali	3	3	3	3	3	3	3	3	1.00
4.	Jumlah Penyiaran Radio/TV/Lokal	kali	1	1	1	1	1	1	1	1	1.00
5.	Website Milik Pemerintah Daerah	bh	1	1	1	1	1	1	1	1	1.00
6.	Pameran/Expo	kali	2	0	2	0	2	0	2	0	0.00

Tabel II.10
Capaian Indikator Kinerja Utama

No	Indikator Kinerja	Satuan	2011		2012		2013		2014		2015		Capaian (%)
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1.	Jumlah PD yang Terkoneksi Jaringan Internet	PD	0	0	0	0	20	10	12	15	52	52	100
2.	Jumlah ketersediaan Prasarana dan sarana Radio	Unit	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	75.90
3.	Jumlah Jam Siaran Radio	Jam	0	0	2,338	3,636	5,958	3,740	5,958	5,958	5.082	5.082	80.00
4.	Jumlah Pembuatan Neon Box	Unit	0	0	0	0	20	20	0	0	0	0	40.00
5.	Jumlah Bantuan Sarana dan Prasana Komunikasi dan Informasi	Unit	0	0	0	0	100	100	0	0	0	0	50.00

Tabel II.13
Capaian Sasaran Strategis Berdasarkan RPJMD, Renstra dan Renja PD

No	Sasaran Strategis	Satuan	2011		2012		2013		2014		2015	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Meningkatnya Prasarana dan Sarana Fasilitas Komunikasi dan Informatika	Paket	2	100%	2	100%	2	100%	2	100%	2	100%

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis SWOT yaitu kondisi internal (Strength dan Weaknesses) dan kondisi eksternal organisasi (Opportunities dan Threats), adapun analisis terhadap lingkungan internal (Strength dan Weaknesses) dan eksternal (opportunities dan threats) Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Musi Rawas sebagai berikut :

1. Analisis Lingkungan Internal

a. Kekuatan (Strengths)

1. Ketersediaan pegawai yang cukup
2. Tugas pokok dan fungsi Diskominfo dan Statistik yang jelas
3. Kebijakan penerapan TIK seperti LPSE, e-Voting dan e-budgetting dan e-goverment
4. Ketersediaan sarana kerja yang memadai
5. Adanya penerapan disiplin pegawai

b. Kelemahan (Weakness)

1. Motivasi dari pegawai yang kurang
 2. Kurangnya aparatur dengan kompetensi bidang komunikasi informatika dan statistik, sehingga kemampuan aparatur di bidang komunikasi informatika dan statistik cukup lemah
 3. Kurangnya pengiriman pendidikan formal dan informal bidang Komunikasi Informatika dan Statistik
4. Masih lemahnya pelaksanaan sistem monitoring dan pengendalian

5. Belum efektifnya pelaksanaan sistem dan mekanisme koordinasi internal dan eksternal

2. Analisis Lingkungan Eksternal :

a. Peluang (Opportunities)

1. Letak geografis yang strategis dimana Kabupaten Musi Rawas yang berada di daerah persimpangan antar Sumatera bagian barat dan Pulau Jawa.
2. Adanya perluasan wilayah yang belum tertangani.
3. Adanya kemajuan iptek di bidang informasi dan komunikasi dan didukung oleh kebijakan pusat

b. Tantangan (Threats)

1. Masih rendahnya pengetahuan dan perilaku masyarakat dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
2. Ketidakpedulian masyarakat terhadap pentingnya sarana dan fasilitas komunikasi, sehingga banyak fasilitas komunikasi yang rusak akibat orang yang tidak bertanggung jawab.
3. Masih banyaknya wilayah yang belum terjangkau jaringan telekomunikasi (blank spot) serta kurangnya pembinaan kemampuan kepada masyarakat tentang manfaat Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagai peluang bisnis.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanannya, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Musi Rawas memiliki permasalahan antara lain :

- a. Kondisi fisik Kabupaten Musi Rawas yang sangat beragam;
- b. Masih banyaknya wilayah dalam Kabupaten Musi Rawas yang tidak terjangkau oleh sebaran informasi atau *Blank Spot*;
- c. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas Aparatur bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
- d. Masih terbatasnya sarana atau infrastruktur pendukung komunikasi dan informatika;
- e. Keterbatasan dana/anggaran dalam pelaksanaan kegiatan;

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

3.2.1 Visi

Proses Pembangunan Kabupaten Musi Rawas lima tahun ke depan tidak bisa dilepaskan dari capaian kinerja lima tahun terakhir, selain telah menghasilkan kemajuan juga masih menyisakan beberapa permasalahan baik permasalahan yang mendasar maupun permasalahan yang berkembang dewasa ini. Kesuksesan mengemban reformasi yang berjalan sebagaimana amanat UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah memberi perubahan yang lebih baik. Meskipun demikian, berbagai permasalahan mendasar menuntut perhatian khusus dalam pembangunan ke depan.

Rencana pembangunan Kabupaten Musi Rawas lima tahun ke depan (2016 – 2021) merupakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi

Rawas tahap ke III dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Musi Rawas (2005 – 2025). Oleh karena itu, proses pembangunan Kabupaten Musi Rawas lima tahun ke depan tidak bisa dilepaskan dari evaluasi terhadap capaian kinerja lima tahun terakhir yang selain telah menghasilkan kemajuan juga masih menyisakan beberapa permasalahan baik permasalahan yang mendasar maupun permasalahan yang berkembang dewasa ini. Lebih jauh lagi, pembangunan lima tahun ke depan juga dihadapkan dengan akan diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asia (Asean Economic Community). Selain itu, dalam rangka sinergitas pembangunan dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, maka rencana pembangunan Kabupaten Musi Rawas lima tahun kedepan yang disusun juga telah berupaya diselaraskan dengan Kebijakan pemerintah pusat seperti Nawacita Presiden Jokowi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan tahun 2013 – 2018. Dalam Kesuksesan mengemban reformasi yang berjalan sebagaimana amanat UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberi perubahan yang lebih baik. Meskipun demikian, berbagai permasalahan mendasar menuntut perhatian khusus dalam pembangunan ke depan.

Memperhatikan hal tersebut di atas, maka selaku Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas mengikrarkan diri untuk terus melanjutkan pembangunan Kabupaten Musi Rawas dan meningkatkan kualitas dan kuantitasnya melalui pencaanangan visi dan misi. Visi Pembangunan Kabupaten Musi Rawas tahun 2016 -2021 adalah:

Mewujudkan “MURA SEMPURNA 2021”

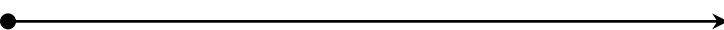
“Sejahtera, Mandiri, Produktif, Unggul, Religius, Nyaman, dan Aman”

Makna visi “Mura Sempurna 2021” adalah “terwujudnya keseimbangan masyarakat Kabupaten Musi Rawas sejahtera dan mandiri yang ditopang oleh produktivitas masyarakat yang tinggi dan didukung oleh SDM yang unggul dalam tata kehidupan masyarakat yang religius dan lingkungan yang nyaman dan aman”. Adapun pengertian dari akronim “SEMPURNA” adalah sebagai berikut:

Sejahtera : Masyarakat dan daerah mencapai kehidupan yang layak secara sosial dan ekonomi dengan tingkat kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan yang rendah dan dengan mobilitas yang lancar. (indikator : kenaikan PDRB per kapita, rumah layak huni, penurunan penduduk miskin, penurunan indeks *gini*

ratio, kenaikan panjang dan kualitas jalan, bertambahnya jumlah alat transportasi, bertambahnya kegiatan ekonomi dan sosial kemasyarakatan.

- Mandiri** : Kemampuan membangun dan mengelola Sumber Daya Alam oleh elemen masyarakat sendiri (indikator: makin bertambahnya jumlah usaha ekonomi produktif berbasis sumber daya alam dan potensi lokal dan dikelola oleh masyarakat daerah).
- Produktif** : Menghasilkan *output* (keluaran) yang tinggi dalam setiap satuan waktu kerja yang dicurahkan atau satuan *input* (masukan) yang digunakan (indikator: naiknya rata-rata kelulusan sekolah, produksi komoditi unggulan daerah, hasil industri pengolahan komoditi tersebut dan nilai tambahnya, serta secara makro makin meningkatnya PDRB).
- Unggul** : Sumberdaya manusia dan wilayah memiliki daya saing tinggi serta memiliki daya kreatif dan inovatif untuk memajukan daerah dan organisasi. (indikator: meningkatnya IPM dan angka partisipasi sekolah serta kelulusan di semua tingkat pendidikan, berkembangnya usaha ekonomi produktif komoditi unggulan dan jasa yang relevan).
- Religius** : Masyarakat bertaqwa dan berakhlak mulia, yang ditandai oleh sikap dan perilaku baik individu maupun masyarakat untuk mengaktualisasikan nilai agama yang dianutnya dalam kehidupan sehari-hari baik dilingkungan keluarga, masyarakat dan berbangsa dan bernegara, dengan demikian akan terciptanya sikap toleransi antar pemeluk agama baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam menjalankan kewajiban Agama bagi masing-masing pemeluknya, (indikator: meningkatnya aktivitas sehari-hari masyarakat melaksanakan ibadah dan kegiatan keagamaan).
- Nyaman** : Adanya tepa selira yaitu sikap saling menjaga keharmonisan/ kerukunan hidup dikalangan masyarakat baik lintas suku, ras, agama, dan budaya. (indikator: tidak ada atau sangat minimnya terjadinya tindakan intoleransi, konflik dalam masyarakat baik konflik vertikal maupun konflik horizontal).
- Aman** : Kabupaten Musi Rawas merupakan daerah yang terbebasnya dan terlindunginya dari rasa takut dari berbagai ancaman, gangguan seperti



kejahatan, teror dan lainnya sehingga baik untuk tinggal maupun berinvestasi. (indikator: terbebasnya dari rasa takut ditandai dengan turunnya angka kriminalitas).

3.2.2 Misi

Untuk menjabarkan Visi Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021, ditetapkan menjadi 7 (tujuh) Misi yaitu :

M1	Memperbaiki kualitas sumber daya manusia dan infrastruktur
M2	Menumbuhkembangkan sistem dan usaha agribisnis dan agroindustri komoditi unggulan
M3	Mengembangkan usaha ekonomi produktif masyarakat non petani
M4	Meningkatkan kemandirian dan keberdayaan masyarakat dalam pembangunan daerah dan pengelolaan sumberdaya alam yang ramah lingkungan
M5	Meningkatkan tata kelola Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan pelayanan prima
M6	Memantapkan pembangunan masyarakat yang religius menuju MURA Darussalam
M7	Memastikan kondisi Kabupaten MURA yang lebih aman dan nyaman untuk berinvestasi, menarik, dan berkesan untuk dikunjungi

Dari pernyataan misi kepala daerah tersebut, yang berkaitan dengan bidang komunikasi informatika dan statistik adalah misi ke 1 yaitu memperbaiki kualitas sumber daya manusia dan infrastruktur, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang baik menuju Musi Rawas Sempurna dengan sasaran meningkatnya kapasitas dan kualitas infrastruktur jaringan untuk layanan teknologi informasi dan komunikasi pemerintahan. Selain berkaitan dengan misi ke 1, bidang komunikasi informatika dan statistik juga berkaitan dengan misi ke 5 yaitu meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, berwibawa dan pelayanan prima, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan sasaran meningkatnya kinerja pemerintah dan kesejahteraan rakyat.

3.2.3 Strategi

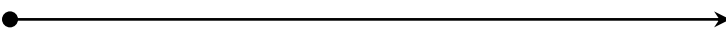
Strategi merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran pembangunan dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga agar segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi. Berdasarkan Visi dan Misi di atas, strategi pembangunan Kabupaten Musi Rawas adalah sebagai berikut:

M1. Memperbaiki kualitas Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur :

1. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan anak usia dini, dasar, menengah dan tinggi melalui peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas pendidikan serta kualitas tenaga pengajar.
2. Meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas sarana kesehatan dan tenaga medis
3. Meningkatkan SDM aparat melalui kursus, pelatihan yang langsung mendukung profesionalisme dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta penempatan pegawai berdasarkan prinsip *the right man on the right place* dan sistem merit.
4. Meningkatkan partisipasi lembaga pendidikan non formal dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap masyarakat dengan tetap mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal.
5. Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur secara merata sampai ke perdesaan (jalan, jembatan, irigasi, listrik, air bersih, telekomunikasi).

M2. Menumbuhkembangkan sistem dan usaha agribisnis dan agroindustri komoditi unggulan:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk pertanian melalui penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna, perluasan areal tanam, peningkatan indeks pertanaman, peningkatan infrastruktur pertanian serta mencegah bertambahnya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian.



2. Memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya agroindustri berskala kecil dan menengah sebagai bagian dari pembangunan industri terpadu.
3. Membangun industri pertanian berkelanjutan dan berdaya saing global berbasis sumber daya lokal yang mendorong penciptaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Kabupaten Musi Rawas.
4. Memberdayakan penyuluh pertanian sebagai ujung tombak pembinaan para petani.
5. Mendorong pengembangan inovasi terutama dalam pengembangan komoditi unggulan daerah.
6. Mempromosikan dan memperluas pasar komoditas unggulan daerah melalui pemanfaatan ICT (Information and Communication Technology) serta membangun dan memperkuat jejaring kerjasama ekonomi (industri dan perdagangan) dan kelembagaan (regional, nasional dan internasional).

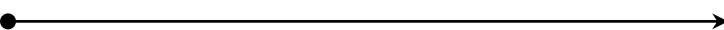
M3. Mengembangkan usaha ekonomi produktif masyarakat non petani:

1. Memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya usaha ekonomi produktif masyarakat non petani melalui peningkatan akses sumber permodalan, produktifitas dan daya saing bagi UKM non pertanian
2. Membangun kemitraan strategis antara koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan usaha besar.
3. Membina usaha ekonomi produktif dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas produknya sehingga menjadi produk yang berdaya saing dan bernilai ekonomi tinggi.
4. Mendirikan lembaga keuangan mikro di tingkat desa dan kelurahan.

M4. Meningkatkan kemandirian dan keberdayaan masyarakat dalam pembangunan daerah dan pengelolaan sumberdaya alam yang ramah lingkungan:

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kearifan masyarakat dalam memanfaatkan sumberdaya alam.
2. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan swasta dalam setiap kegiatan pembangunan
3. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya alam dengan pendekatan secara bijak dan tegas terhadap pengganggu kelestarian atau perusak SDA.

M5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, berwibawa dan pelayanan prima.



1. Meningkatkan pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan pelaksanaan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik/Good Governance.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi dan sistem informasi terpadu (e-government).
3. Membangun pelayanan satu titik (one stop services) untuk pelayanan publik, dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelayanan.
4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan pemanfaatan ICT (Information and Communication Technology) di segala bidang.
5. Meningkatkan pengawasan publik untuk menjamin akuntabilitas pelayanan publik.

M6. Memantapkan pembangunan masyarakat yang religius menuju MURA Darussalam:

1. Meningkatkan pemahaman keagamaan masyarakat melalui pendidikan, penerangan dan pengajaran.
2. Menciptakan suasana kehidupan agamis dengan pengamalan nilai-nilai keagamaan serta membina toleransi dan kerukunan hidup antara umat beragama.
3. Meningkatkan pengetahuan dan wawasan para tokoh keagamaan.

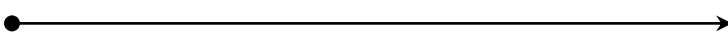
M7. Memastikan kondisi Kabupaten MURA yang lebih aman dan nyaman untuk berinvestasi, menarik dan berkesan untuk dikunjungi:

1. Menciptakan iklim yang kondusif untuk berinvestasi melalui penerbitan kebijakan (regulasi dan deregulasi) yang mendukung.
2. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka meningkatkan keamanan dan kenyamanan dalam berinvestasi.
3. Memperbaiki dan meningkatkan pelayanan publik berbasis ICT yang efektif dan efisien dalam pelayanan investasi.

Program Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik dalam mendukung fokus pembangunan daerah Kabupaten Musi Rawas untuk mewujudkan misi dan program Kepala Daerah adalah sebagai berikut :

Misi 1 : Memperbaiki kualitas sumber daya manusia dan infrastruktur

Tujuan 3 : Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang baik



Sasaran 11 : Meningkatkan Kapasitas dan kualitas infrastruktur jaringan untuk layanan teknologi informasi dan komunikasi pemerintahan

Strategi : Melaksanakan tata kelola infrastruktur jaringan teknologi informasi secara terpadu.

- Arah Kebijakan :
1. Memetakan dan menyusun topologi sistem jaringan komunikasi
 2. Menyediakan dan memelihara sarana dan prasarana sistem jaringan komunikasi berbasis teknologi informasi terkini
 3. Mengelola dan mengendalikan lalu lintas data dan komunikasi internet
 4. Meningkatkan kapasitas aksesibilitas (Bandwidth) sistem jaringan.

Program Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik :

- Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
- Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
- Program Kerjasama Informasi dan Media Massa
- Program Layanan e-Government
- Program Pengelolaan Komunikasi Publik
- Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
- Program Keamanan Informasi dan Persandian

3.3 Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra OPD Provinsi

3.3.1 TELAAH RENSTRA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI SUMSEL

Visi merupakan cita-cita dan harapan semua unsur organisasi yang dipergunakan sebagai pedoman dan pendorong untuk mencapai tujuan organisasi yang menggambarkan tentang apa yang akan dicapai di masa depan sebagai hasil komitmen dan kesepakatan semua unsur organisasi. Telah mantapnya penerapan otonomi daerah yang ditunjang oleh berkembangnya sistem perdagangan barang dan jasa unggulan, jaringan kerja dan lingkungan yang kondusif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum.

Sasaran antara yang telah ditetapkan tersebut, dipandang sebagai sasaran kongkrit yang akan diwujudkan pada jangka waktu 5 (lima) tahun. Untuk mewujudkan sasaran tersebut, perlu

dirumuskan secara tepat Visi, Misi, tujuan dan sasaran, strategi serta pencapaian tujuan dan sasaran dalam bentuk kebijakan yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 5 (lima) tahun.

Visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Sumsel ditetapkan dalam rangka untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Visi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yaitu : **“Sumatera Selatan Sejahtera dan Terdepan Bersama Masyarakat Cerdas yang Berbudaya”** Untuk mendukung terwujudnya visi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tersebut, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan menetapkan visinya yaitu : **“Terwujudnya Sistem Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Handal dalam rangka Pembangunan Sumatera Selatan yang Berkelanjutan”**.

Untuk mewujudkan visi diatas maka Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan menetapkan misi Mengembangkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penetapan misi tersebut adalah Terwujudnya penyebaran layanan informasi dan komunikasi publik, dengan sasaran yaitu :

1. Peningkatan jaringan pelayanan internet gratis
2. Peningkatan desa yang memanfaatkan Universal Service Obligation (USO) atau layanan desa berdering.
3. Peningkatan kerjasama dengan media massa

Adapun strategi dan kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yaitu sebagai berikut :

1. Peningkatan Jaringan Pelayanan Internet Gratis
 - a. Layanan internet gratis di tempat umum
 - b. Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
2. Peningkatan Desa yang memanfaatkan USO
 - a. Revitalisasi jasa layanan pos
 - b. Pengembangan layanan USO
3. Peningkatan kerjasama dengan media massa

3.3.2 TELAAH RENSTRA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Sesuai Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia nomor 22 tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2015-2019

Visi Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah visi institusi yang digunakan sebagai arahan kepada semua jajaran Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Rumusan itu disusun untuk mendukung tercapainya visi Pembangunan Nasional Tahun 2005—2025. Untuk itu, seluruh sektor pembangunan dalam pemerintahan dan seluruh potensi bangsa wajib mewujudkan visi tersebut. Khusus Kementerian Komunikasi dan Informatika diharapkan dapat memberikan kontribusi melalui upaya mewujudkan masyarakat yang berpengetahuan, mandiri, dan berdaya saing tinggi melalui pemanfaatan TIK.

Institusi yang memiliki kewajiban dan kewenangan serta tanggung jawab mewujudkan masyarakat informasi yang berpengetahuan, inovatif, komunikatif, mandiri, sejahtera, berdaya saing global berkarakter Indonesia tidak hanya Kementerian Komunikasi dan Informasi, tetapi juga pihak lain, baik lembaga pemerintah maupun non-pemerintah. Dalam konteks tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informasi memiliki fungsi sebagai perumus kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, kebijakan teknis, serta pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika.

Sedangkan tantangan dan potensi program USO yang mendukung fokus pembangunan pemerintah Indonesia, antara lain:

1.. Kebutuhan akses internet untuk SMK/SMU

Berdasarkan data dari Kementerian Pendidikan Dasar, Menengah, dan Kebudayaan menyebutkan 10.473 SMK dan SMU memerlukan ketersediaan akses internet dan pemberdayaan TIK melalui e-literasi. Sedangkan terkait peningkatan keahlian dan kompetensi SDM bidang komunikasi dan informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika mengadakan ToT Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dengan target 2015—2019 sebanyak 13.175 peserta.

2. Kebutuhan ketersediaan jaringan internet untuk informasi pertanian

Sesuai dengan data yang di keluarkan oleh Kementerian Pertanian, terdapat 5.232 Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (BP3K) membutuhkan penyediaan, penguatan, dan peningkatan akses internet untuk penyebaran informasi publik bidang pertanian. Tersedianya akses internet dalam kaitannya dengan desa pertanian dapat memudahkan petani untuk mencari informasi mengenai bibit unggul, harga pupuk, ataupun teknik berocok tanam yang baik serta segala informasi yang menyangkut bidang pertanian sehingga dapat mengurangi potensi kerugian yang akan terjadi. Selain itu, petani juga dapat mengecek harga pasaran produk pertanian mereka tanpa harus pergi ke kota. Dengan adanya internet, petani dapat mempromosikan hasil pertanian kepada calon pelanggan di luar kota lebih cepat sehingga tingkat ekonomi petani juga dapat meningkat.

Potensi dan permasalahan yang penyelesaiannya merupakan prioritas Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai *leading sector* di bidang komunikasi dan informatika adalah antara lain:

1. Belum Terintegrasinya Database dan Layanan e-Gov Pemerintah Pusat dan Daerah

E-Government (electronic government) adalah suatu pemanfaatan teknologi informasi, baik internet maupun non-internet, untuk menyediakan pelayanan yang lebih nyaman dan efisien terhadap warga dan organisasi atas informasi dan pelayanan pemerintah yang berbasis internet, seperti portal, website, email, blog, dan lain-lain Konsep yang diusung ini sebenarnya cukup baik, namun belum terintegrasinya database dan layanan *e-government* antara instansi pemerintah pusat dan daerah menjadi kendala dalam penerapan layanan e-government secara nasional

2. Makin Diminatinya Transaksi Jual Beli melalui Internet

Jumlah pengguna internet aktif di Indonesia yang mencapai 73 juta pengguna dimana 7%-nya melakukan transaksi jual-beli melalui internet¹¹. Hal ini mendorong terciptanya *e-commerce* yang makin diminati oleh masyarakat



Indonesia. *E-commerce* sendiri diartikan sebagai proses membeli dan menjual produk secara elektronik oleh konsumen dan dari perusahaan ke perusahaan dengan komputer dan internet sebagai perantara transaksi bisnis¹². Pada tahun 2014, nilai transaksi e-commerce mencapai \$12 miliar atau Rp 150 triliun. Mengingat banyaknya peminat dan pemain dalam bidang ini, pemerintah menetapkan target untuk transaksi sampai dengan tahun 2016 mencapai \$24 miliar atau Rp 300 triliun.

Pada tahun 2015—2019 pembangunan komunikasi dan informatika akan menitikberatkan kepada 4 (empat) sasaran strategis dengan indikator kinerja utama sebagai berikut :

Tabel III.1
Sasaran Strategis / IKS Kementerian Kominfo

Sasaran Strategis/ IKS		2015	2016	2017	2018	2019
SS.1.	<i>Terwujudnya ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung fokus pembangunan pemerintah sebagai wujud kehadiran negara dalam menyatakan kedaulatan dan pemerataan pembangunan</i>					
IKS.1	Jumlah pembangunan sarana/Tugu Berkode Pos di wilayah perbatasan dan pulau terdepan di Indonesia	20 Tugu Berkode Pos	50 tugu berkode pos	Monev tugu berkode pos	Monev tugu berkode pos	Monev tugu berkode pos
IKS.2	Persentase (%) penyelesaian Redesain USO	100% (Penyelesaian Regulasi terkait Redesain USO)	Monev Redesain USO	Monev Redesain USO	Monev Redesain USO	Monev Redesain USO
IKS.3	Jumlah BTS yang dibangun di daerah <i>blankspot</i> layanan telekomunikasi (Tertinggal, Terluar	125 BTS	125 BTS	125 BTS	125 BTS	125 BTS

IKS.4	Jumlah penyediaan akses <i>pitalebar</i> internet	800 Lokasi (Sesuai prioritas SD, SMP, SMA, Madrasah, rusunawa, desa nelayan, desa pertanian, desa pedalaman)	800 Lokasi (Sesuai prioritas :i SD, SMP, SMA, Madrasah, rusunawa, desa nelayan, desa pertanian, desa pedalaman)	800 Lokasi (Sesuai prioritas :i SD, SMP, SMA, Madrasah, rusunawa, desa nelayan, desa pertanian, desa pedalaman)	800 Lokasi (Sesuai prioritas :i SD, SMP, SMA, Madrasah, rusunawa, desa nelayan, desa pertanian, desa pedalaman)	800 Lokasi (Sesuai prioritas :i SD, SMP, SMA, Madrasah, rusunawa, desa nelayan, desa pertanian, desa pedalaman)
IKS.5	Persentase (%) tersedianya satelit <i>pitalebar</i> Nasional	100% (Kajian Feasibility Study)	100% (tender penyedia satelit)	40% Penyediaan Satelit dan sarana dan infrastruktur	60% Penyediaan Satelit dan sarana dan infrastruktur	100%
SS.2	<i>Tersedianya akses pitalebar nasional, internet dan penyiaran digital yang merata dan terjangkau untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan</i>					
IKS.1	Persentase(%) ketersediaan spektrum frekuensi radio untuk mendukung layanan akses bergerak <i>pitalebar</i>	20 MHz	70 MHz	70 MHz	90 MHz	100 MHz

IKS.2	Persentase (%) kab/kota yang terhubung Jaringan tulang punggung serat optik nasional palapa ring	Persiapan regulasi, Dokumen lelang dan pelaksanaan lelang, dan Ground breaking Pembangunan Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Nasional Palapa Ring untuk 51 Kab/kota tertinggal)	Penggelaran palapa ring di 26 kab/ Kota	Penggelaran palapa ring di 25 kab/kota (100% di 51 Kab/Kota)	Monev Palapa Ring	Monev Palapa Ring
IKS.3	Persentase (%) selesainya migrasi sistem penyiaran televisi dari analog ke digital (	100% Penyusunan Regulasi TV Digital	menjadi 80% (sulawesi)	Menjadi 90% (MALUKU +PAPUA + Bangka Belitung+ Gorontalo)	menjadi 100% (NATIONAL WIDE ANALOG SWITCH OFF)	Monev TV digital
IKS.4	Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan nomor panggilan tunggal darurat nasional (<i>single publik emergency number</i>)	Implementasi di 10 (sepuluh) Kabupaten/ Kota	Implementasi di 120 Kab/ Kota	Implementasi di 120 Kab/ Kota	Implementasi di 120 Kab/ Kota	Implementasi nasional
IKS.5	Persentase (%) Kab/Kota yang memiliki infrastruktur pasif telekomunikasi melalui supervisi Kemenkominfo	Pembangunan 3 kota lokasi pengembangan infrastruktur pasif bersama	Pembangunan 5 kota pengembangan infrastruktur pasif bersama	Monev infrastruktur pasif telekomunikasi	Monev infrastruktur pasif telekomunikasi	Monev infrastruktur pasif telekomunikasi

IKS.6	Persentase (%) penetapan dan implelementasi Permen kominfo tentang TKDN 4G LTE	100% (ditetapk annya permen kominfo tentang TKDN 4G LTE)	100% (persiap an menjela ng impleme ntasi)	100% (imple mentas i permen)	Monev Permen Kominf o tentang TKDN 4G LTE	Monev Permen Kominf o tentang TKDN 4G LTE
IKS.7	Persentase (%) instansi pemerintah yang terintegrasi layan e- government Nasional	100% (masterp lan arsitekt ur e- Govern ment Nasional)	Monev integrasi e- gov	Monev integra si e-gov	Monev integra si e-gov	Monev integra si e- gov
IKS.8	Jumlah penyelengga ra jaringan telekomunikasi yang mengimplementa sikan DNS Nasional	4 penyelen ggara	Monev impleme ntasi DNS Nasional	Monev implem entasi DNS Nasion al	Monev implem entasi DNS Nasional	Monev implem entasi DNS Nasional
IKS.9	Persentase (%) peningkatan perlindungan keamanan kepada penyelenggara, serta kualitas dan keamanan informasi kepada pengguna layanan komunikasi dan informatika (ID-SIRTII dan KAMINFO)	100%	100%	100%	100%	100%
SS.3	Terselenggaranya tata kelola Komunikasi dan Informatika yang efisien, berdaya saing, dan aman					
IKS.1	Jumlah dokumen regulasi dan kebijakan bidang telekomunikasi	4 dokume n regulasi / kebijakan	Monev regulasi dan kebijakan bidang telekom unikasi	Monev regulasidan kebijakan bidang teleko munikasi	Monev regulasi dan kebijakan bidang teleko munikasi	Monev regulasi dan kebijakan bidang teleko munikasi

IKS.2	Jumlah Peraturan Menteri terkait Penyelenggaraan <i>National Chief Information Officer (NCIO)</i>	1 PM	Implementasi, pemantauan dan pengawasan pelaksanaan permen	Monev Permen terkait NCIO	Monev Permen terkait NCIO	Monev Permen terkait NCIO
IKS.3	Jumlah Peraturan Menteri terkait penyelenggaraan sertifikasi elektronik dan penyelenggaraan sertifikasi keandalan	2 PM	Implementasi, pemantauan dan pengawasan pelaksanaan permen	Monev Permen terkait sertifikasi elektronik dan penyelenggaraan sertifikasi keandalan	Monev Permen terkait sertifikasi elektronik dan penyelenggaraan sertifikasi keandalan	Monev Permen terkait sertifikasi elektronik dan penyelenggaraan sertifikasi keandalan
IKS.4	Jumlah regulasi untuk penyebaran dan pemerataan informasi publik	6 regulasi	Implementasi dan pemantauan serta pengawasan pelaksanaan kebijakan	Monev regulasi terkait penyebaran dan pemerataan informasi publik	Monev regulasi terkait penyebaran dan pemerataan informasi publik	Monev regulasi terkait penyebaran dan pemerataan informasi publik
IKS.5	Jumlah regulasi terkait implementasi <i>Government Publik Relations (GPR)</i>	5 regulasi	Implementasi dan pemantauan serta pengawasan pelaksanaan kebijakan	Monev regulasi terkait GPR	Monev regulasi terkait GPR	Monev regulasi terkait GPR
IKS.6	Jumlah kebijakan terkait diseminasi Kampanye Nasional Revolusi Mental	2 kebijakan	Implementasi dan pemantauan serta pengawasan pelaksanaan kebijakan	Monev kebijakan terkait revolusi mental	Monev kebijakan terkait revolusi mental	Monev kebijakan terkait revolusi mental

SS.4	<i>Terciptanya budaya pelayanan, revolusi mental, reformasi birokrasi dan tata kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berintegritas, bersih, efektif, dan efisien</i>					
IKS.1	Persentase (%) rekomendasi kebijakan berbasis penelitian/kajian (termasuk studi dampak sosial ekonomi implementasi <i>pitalebar</i> , internet, dan Digitalisasi Penyiaran)	30% (dari 20 dokumen)	30% (dari 20 dokumen)	30% (dari 20 dokum en)	30% (dari 20 dokumen)	30% (dari 20 dokumen)
IKS.2	Jumlah peserta sertifikasi, pelatihan, bimtek, dan ToT SKKNI bagi angkatan kerja muda	7.575 Orang	1250 orang	1450 Orang	1450 orang	1450 orang
IKS.3	Jumlah Rancangan Regulasi SKKNI Bidang Kominfo	4 RSKKNI	4 RSKKNI	4 RSKKNI	4 RSKKNI	4 RSKKNI
IKS.4	Jumlah peserta bimtek literasi bagi kalangan wanita, anak-anak, dan disabilitas	2.500 peserta	4100 peserta	5100 Peserta	6100 peserta	7100 peserta
IKS.5	Opini BPK-RI Atas Laporan Keuangan Kementerian Komunikasi dan Informatika	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
IKS.6	Persentase (%) penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Kemenkominfo	100% (2 satker utama)	100%	100%	100%	100%
IKS.7	Persentase (%) terselesaikannya pelaksanaan kebijakan <i>Change Management</i>	100%	100%	100%	100%	100%

IKS.8	Persentase (%) tersedianya system dan mekanisme Partisipasi Publik (Planning, design, execution dan monitoring) anggaran dan kebijakan	100%	100%	100%	100%	100%
-------	--	------	------	------	------	------

3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana struktur ruang yang dikembangkan adalah rencana yang dapat mengoptimalkan masing-masing wilayah sehingga tercipta pemenuhan kebutuhan antara wilayah satu terhadap wilayah lainnya. Berdasarkan rumusan strategi pengembangan wilayah, struktur ruang Kabupaten Musi Rawas diarahkan pada penguatan peran Kota Muara Beliti sebagai pusat ibukota kabupaten dan pusat agropolitan, pengembanaan pusat-pusat pelayanan pada kawasan perbatasan sehingga menempatkan peran Kabupaten Musi Rawas sebagai pusat agropolitan regional.

Secara alamiah struktur ruang wilayah Kabupaten Musi Rawas mempunyai ciri khas, dimana pusat permukiman tumbuh disepanjang jalan lintas Sumatera (Utara-Selatan) dan jalan dari Lubuklinggau menuju Kota Palembang (Barat-Timur).

Memepertimbangkan kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Musi Rawas akan didekati dengan pola agropolitan maka dalam hal ini, perlu disampaikan bahwa struktur ruang kawasan agropolitan merupakan gambaran sistem pusat kegiatan kawasan dan jaringan prasarana yang dikembangkan untuk mengintegrasikan kawasan selain untuk melayani kegiatan pertanian dalam arti luas, baik tanaman pangan, perikanan, perkebunan, kehutanan, maupun peternakan. Jaringan prasarana pembentuk struktur ruang kawasan agropolitan meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, dan sistem jaringan sumber daya air. Struktur ruang Kabupaten Musi Rawas direncanakan sebagai berikut :

1. Pusat Kegiatan Lokal

Adapun yang diarahkan menjadi Pusat Kegiatan Lokal adalah :

- a. Kota Muara Beliti
- b. Muara Lakitan
2. Pusat Pelayanan Kawasan

Adapun yang akan diarahkan menjadi Pusat Pelayanan Kawasan adalah :

- a. Simpang Terawas (STL Ulu Terawas)
- b. Megang Sakti
- c. Simpang Semambang (Tuah Negeri)
3. Pusat Pelayanan Lingkungan

Adapun yang diarahkan menjadi Pusat Pelayanan Lingkungan adalah ibukota dari kecamatan berikut :

- a. Tugumulyo (Kecamatan Tugumulyo)
- b. Muara Kelingi (Kecamatan Muara Kelingi)
- c. Jayaloka (Kecamatan Jayaloka)
- d. Selangit (Kecamatan Selangit)
- e. Sumber Harta (Kecamatan Sumber Harta)
- f. Purwodadi (Kecamatan Purwodadi)
- g. Ciptodadi (Kecamatan Sukakarya)
- h. Muara Kati Baru I (Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut)
- i. Bangun Jaya (Kecamatan Bulang Tengah Suku Ulu)

Tabel III.2
Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah

No	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan PD
1	Sistem Perkotaan	Sistem Perkotaan	- Program pembangunan jalan dan jembatan - Program pembangunan saluran drainase dan gorong-gorong - Program pembangunan turap/talud/bronjong - Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya - Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah - Program pengendalian banjir - Program pengembangan perumahan - Program lingkungan sehat perumahan.	- Kajian Pola penempatan Menara Telekomunikasi BTS - Perwujudan pemanfaatan bersama BTS
2	Rencana jaringan prasarana wilayah	Sistem jaringan transportasi	- Program pembangunan bandara - Program pembangunan terminal - Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan - Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup - Program peningkatan ketahanan	- Kajian Pola penempatan Menara Telekomunikasi BTS - Perwujudan pemanfaatan bersama BTS

Tabel III.3
Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah

No	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan PD
1	Rencana kawasan lindung	Rencana kawasan lindung	- Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. - Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam	Penyebaran informasi dan perwujudan kawasan lindung dan mitigasi bencana melalui Media massa

			• Program pengendalian kebakaran hutan. • Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	
2	Kawasan Rawan Bencana	Kawasan rawan bencana	- Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam - Program pencegahan banjir	Dukungan sarana informasi peringatan dini pada daerah rawan bencana
3	Rencana kawasan budidaya	Rencana kawasan budidaya	- Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan - Program pengembangan tanaman hutan raya.	• Penyebaran informasi peningkatan penerapan teknologi pertanian dan perkebunan melalui Media massa

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau suatu hal yang harus diperhatikan atau kedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi kemajuan Kabupaten Musi Rawas dimasa datang. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau permasalahan yang belum terselesaikan pada periode sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pembangunan daerah sehingga perlu diatasi secara bertahap.

Dengan memperhatikan kondisi saat ini dan untuk memenuhi tuntutan perkembangan birokrasi yang professional sebagai konsekuensi derasnya arus informasi dan arus globalisasi, sudah selayaknya Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Musi Rawas mengambil langkah-langkah menuju perubahan, serta mempersiapkan hal-hal yang diperlukan guna menyempurnakan kekurangan selama ini. Untuk menghadapi tantangan di masa yang akan datang yang sudah barang tentu akan semakin kompleks.

Berdasarkan identifikasi permasalahan-permasalahan dan telaahan yang telah dilakukan meliputi :

- Gambaran pelayanan
- Sasaran dan kebijakan RPJMD Periode 2016-2021
- Sasaran jangka menengah Kementerian/Lembaga
- Sasaran jangka menengah SKPD Provinsi
- Implikasi RTRW Kabupaten Musi Rawas
- Implikasi KLHS Kabupaten Musi Rawas

Maka Isu-isu Strategis pembangunan jangka menengah Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Musi Rawas adalah sebagai berikut :

- Peningkatan profesionalisme aparatur Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Musi Rawas

Profesionalisme Aparatur pelaksana bidang komunikasi informatika dan statistik sangat dibutuhkan dalam melaksanakan pembangunan bidang komunikasi informatika dan statistik.

- Pembangunan dan Penyediaan Infrastruktur Teknologi Informasi

Penyediaan infrastruktur bidang komunikasi dan informatika yang belum mencapai daerah-daerah terpencil.

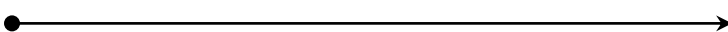
- Musi Rawas Smart City

Musi Rawas Smart City memiliki makna bahwa diharapkan untuk kedepannya Kabupaten Musi Rawas memiliki manfaat dari keberadaan teknologi informasi yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Musi Rawas dalam bentuk peningkatan pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

- Pelaksanaan dan penerapan kaidah-kaidah e-Government

Memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat adalah salah satu tujuan utama dari segala pelaksanaan urusan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas. Tujuan tersebut dapat terlaksana secara optimal apabila dilakukan dengan menggunakan Teknologi Sistem Informasi dan Komunikasi masing-masing urusan, yang semula hanya dilakukan secara manual yang membutuhkan tenaga dan waktu yang lebih besar. Dengan penerapan dan pelaksanaan kaidah-kaidah e-Government pelaksanaan segala urusan dapat lebih efektif dan efisien.

- Keterbukaan dan Transparansi Informasi Bagi Masyarakat



Seiring dengan semakin berubahnya pola pikir masyarakat yang semakin maju, kritis dan berkembang, maka tuntutan terhadap keterbukaan dan transparansi akan data dan informasi semakin tinggi pula. Hal ini berimbas kepada semakin kritis dan berani masyarakat terhadap akses dalam menyampaikan pendapat dan akan terus berupaya untuk mencari informasi yang relevan dengan situasi dan kondisi yang sedang dihadapinya.

- **Pembangunan Kabupaten Musi Rawas Yang Berbasis Data**

Pembangunan berbasis data kini gencar mulai dilaksanakan oleh pemerintah dan juga organisasi non pemerintah. Salah satu faktor kegagalan pembangunan kita adalah lemahnya data dan informasi yang valid tentang rencana pelaksanaan pembangunan. Pengelolaan data dan informasi statistik daerah menjadi salah satu tujuan dan sasaran yang hendak dicapai oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Musi Rawas.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan Jangka Menengah

Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan mengenai hal-hal yang akan dilakukan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi serta sebagai jawaban terhadap isu-isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah yang sedang dan akan dihadapi. Adapun tujuan yang ingin dicapai Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Musi Rawas berdasarkan visi dan misi RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021 yang sejalan dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika adalah :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dibidang teknologi informasi dan komunikasi.

Meningkatkan kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia untuk memiliki kompetensi di bidang teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya untuk mewujudkan pelayanan prima.

2. Mewujudkan pengelolaan komunikasi publik yang transparan dan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi.

3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang baik.

Pemenuhan infrastruktur jaringan yang terpadu diperlukan sebagai landasan konektifitas bagi komunikasi data layanan teknologi informasi dan komunikasi. Pemanfaatan teknologi modern yang berbasis teknologi informasi merupakan faktor pendukung untuk meningkatkan kualitas layanan informasi yang bisa diakses secara cepat dan tepat.

4. Meningkatkan kualitas sistem aplikasi sehingga terwujudnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, efisien dan akuntabel.

Pengelolaan sistem aplikasi yang baik akan terwujudnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat lebih baik.

5. Meningkatkan tata kelola data statistik sektoral daerah dan sistem keamanan data dan informasi berklasifikasi secara menyeluruh milik pemerintah daerah.

Tata kelola data statistik sektoral daerah yang akurat dapat membantu dalam proses perencanaan dan penentuan kebijakan pembangunan serta sistem keamanan data dan informasi secara menyeluruh milik pemerintah daerah.

4.2. Sasaran Jangka Menengah

Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari setiap tujuan yang diimplementasikan kedalam suatu bentuk program atau kegiatan. Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Musi Rawas dari setiap tujuan yang telah disebutkan diatas berdasarkan RPJMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kuantitas SDM bidang teknologi informasi yang berkualitas.
2. Terwujudnya pengelolaan komunikasi publik yang transparan dan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi.
3. Meningkatnya kapasitas dan kualitas infrastruktur jaringan untuk layanan teknologi informasi dan komunikasi.
4. Meningkatnya cakupan layanan e-Government yang meliputi government to government, government to bisnis dan government to citizen.
5. Meningkatnya tata kelola data statistik sektoral daerah dan sistem keamanan data dan informasi berklasifikasi secara menyeluruh milik pemerintah daerah.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Musi Rawas beserta indikator kinerjanya dapat digambarkan sebagaimana berikut :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke				
				2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM)	Meningkatnya kuantitas SDM bidang teknologi informasi	Persentase pelaksanaan pengembangan SDM Aparatur bidang	15	25	40	50	70

	dibidang teknologi informasi dan komunikasi.	yang berkualitas.	komunikasi, informatika, statistik dan persandian					
2	Mewujudkan pengelolaan komunikasi publik yang transparan dan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	Terwujudnya pengelolaan komunikasi publik yang transparan dan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	Persentase desa yang dapat dijangkau siaran Radio Darussalam	10	20	35	50	70
			Persentase website OPD yang aktif	20	30	45	60	80
			Jumlah PPID	-	2	2	2	2
3	Meningkatkan kualitas infrastruktur jaringan yang baik.	Meningkatnya kapasitas dan kualitas infrastruktur jaringan untuk layanan teknologi informasi dan komunikasi.	Persentase penuntasan Blank Spot Area	20	30	45	60	70
			Persentase layanan akses internet pemerintahan	10	30	45	70	80
4	Meningkatkan kualitas sistem aplikasi sehingga terwujudnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, efisien dan akuntabilitas	Meningkatnya cakupan layanan e-Government yang meliputi government to government, government to bisnis dan government to citizen	Persentase pelaksanaan dan penerapan e-Government pada penyelenggaraan pemerintah	10	30	45	70	100
			Persentase cakupan standarisasi LPSE sesuai ketentuan berlaku	20	40	50	60	75
5	Meningkatkan tata kelola data statistik sektoral daerah dan sistem keamanan data	Meningkatnya tata kelola data statistik sektoral daerah dan sistem	Jumlah ketersediaan Dokumen Data Statistik Daerah	4	14	4	4	4
			Persentase pengelolaan	10	35	60	75	80



	informasi berklasifikasi secara menyeluruh milik pemerintah daerah.	keamanan data dan informasi berklasifikasi secara menyeluruh milik pemerintah daerah.	layanan persandian dan keamanan informasi di daerah					
--	---	---	---	--	--	--	--	--

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana perangkat daerah mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategi tidak saja mengagendakan aktifitas pembangunan, tetapi juga agar segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen dan pemanfaatan teknologi informasi.

5.1. Strategi

Strategi adalah langkah-langkah yang akan dilakukan dan berisi program-program indikatif guna mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah disepakati. Adapun strategi yang akan dilakukan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Musi Rawas dari setiap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk dicapai adalah :

1. Strategi dari tujuan pertama adalah :
 - Meningkatkan kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika melalui pelaksanaan maupun keikutsertaan dalam bimtek-bimtek bidang teknologi dan informasi.
2. Strategi dari tujuan kedua adalah :
 - Meningkatkan layanan, jangkauan dan akses masyarakat terhadap informasi pembangunan daerah.
3. Strategi dari tujuan ketiga adalah :
 - Melaksanakan tata kelola infrastruktur jaringan teknologi informasi secara terpadu
4. Strategi dari tujuan keempat adalah :
 - Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan Aplikasi yang terintegrasi
5. Strategi dari tujuan kelima adalah :
 - Melaksanakan pengelolaan informasi data statistik sektoral daerah dan sistem keamanan data dan informasi berklasifikasi secara menyeluruh milik pemerintah daerah.

5.2. Kebijakan

Kebijakan merupakan pedoman pelaksanaan tindakan tertentu yang didasarkan pada pandangan pimpinan, sehingga dengan penetapan kebijakan ini dapat ditentukan secara teliti tentang bagaimana strategi akan dilaksanakan. Kebijakan adalah tindakan yang akan diambil untuk mencapai tujuan. Berdasarkan hal tersebut maka kebijakan dari setiap tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Musi Rawas adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan dari tujuan pertama adalah :
 - Melaksanakan bimbingan ataupun pelatihan-pelatihan bagi SDM aparatur bidang komunikasi, informatika, statistik ataupun persandian.
 - Mengikutsertakan SDM Aparatur pada bimbingan teknis dan pelatihan-pelatihan bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian.
2. Kebijakan dari tujuan kedua adalah :
 - Meningkatkan jumlah kemitraan dengan media penyebar informasi baik media cetak, elektronik dan media online.
 - Perluasan jangkauan siaran radio daerah melalui pengembangan dan pemanfaatan teknologi terbaru
 - Peningkatan pelayanan Website dan PPID dalam penyebaran informasi pembangunan daerah
 - Melakukan pembinaan dan pemberdayaan terhadap komunitas informasi publik
3. Kebijakan dari tujuan ketiga adalah :
 - Memetakan dan membangun sistem jaringan teknologi dan komunikasi.
 - Menyediakan dan memelihara sarana dan prasarana sistem jaringan komunikasi berbasis teknologi informasi terkini.
 - Meningkatkan aksesibilitas sistem jaringan.
4. Kebijakan dari tujuan keempat adalah :
 - Menyediakan server basis data dan aplikasi.
 - Menyediakan Aplikasi baik yang berbasis web maupun yang berbasis mobile.
5. Kebijakan dari tujuan kelima adalah :
 - Mengadakan dan memelihara sarana dan prasarana pengelola data dan informasi
 - Mengikutsertakan aparatur pada bimbingan teknis bidang statistik dan persandian

Pernyataan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Musi Rawas beserta indikator kinerjanya dapat digambarkan sebagaimana berikut :

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : MURA SEMPURNA 2021 (Sejahtera, Mandiri, Produktif, Unggul, Religius, Aman, Nyaman)			
Misi 1 : Memperbaiki kualitas sumber daya manusia dan infrastruktur			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dibidang teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya kuantitas SDM bidang teknologi informasi yang berkualitas	Meningkatkan kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika melalui pelaksanaan maupun keikutsertaan dalam bimtek-bimtek bidang teknologi dan informasi.	Melaksanakan bimbingan ataupun pelatihan-pelatihan bagi SDM Aparatur bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian.
			Mengikutsertakan SDM Aparatur pada bimbingan teknis dan pelatihan-pelatihan bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian.
Mewujudkan pengelolaan komunikasi publik yang transparan dan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	Terwujudnya pengelolaan komunikasi publik yang transparan dan berbasis teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatkan layanan, jangkauan dan akses masyarakat terhadap informasi pembangunan daerah	Meningkatkan jumlah kemitraan dengan media penyebar informasi baik media cetak, elektronik dan media online.
			Perluasan jangkauan siaran radio daerah melalui pengembangan dan pemanfaatan teknologi terbaru.
			Peningkatan pelayanan Website dan PPID dalam penyebaran informasi pembangunan daerah.
			Melakukan

			pembinaan dan pemberdayaan terhadap komunitas informasi publik.
Meningkatkan kapasitas dan kualitas infrastruktur jaringan untuk layanan teknologi informasi dan komunikasi	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur jaringan untuk layanan teknologi informasi dan komunikasi	Melaksanakan tata kelola infrastruktur jaringan teknologi informasi secara terpadu	Memetakan dan membangun sistem jaringan teknologi dan komunikasi.
			Menyediakan dan memelihara sarana dan prasarana sistem jaringan komunikasi berbasis teknologi informasi terkini.
			Meningkatkan aksesibilitas sistem jaringan.
Meningkatkan kualitas sistem aplikasi sehingga terwujudnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat lebih baik	Meningkatnya cakupan layanan e-Government yang meliputi government to government, government to bisnis dan government to citizen.	Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan aplikasi yang terintegrasi	Menyediakan server basis data dan aplikasi
			Menyediakan aplikasi baik yang berbasis web maupun yang berbasis mobile.
Meningkatkan tata kelola data statistik sektoral daerah dan sistem keamanan data dan informasi berklasifikasi secara menyeluruh milik pemerintah daerah	Meningkatnya tata kelola data statistik sektoral daerah dan sistem keamanan data dan informasi berklasifikasi secara menyeluruh milik pemerintah daerah	Melaksanakan pengelolaan informasi data statistik sektoral daerah dan sistem keamanan data dan informasi berklasifikasi secara menyeluruh milik pemerintah daerah.	Mengadakan dan memelihara sarana dan prasarana pengelola data dan informasi
			Mengikutsertakan aparatur pada bimbingan teknis bidang statistik dan persandian

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program dan Kegiatan

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya dilakukan untuk mengetahui capaian kebersihan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program yang dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Program dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Strategis berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan mengacu pada Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dalam rangka pencapaian visi dan misi Kabupaten Musi Rawas.

Program kerja operasional pada dasarnya merupakan upaya untuk mengimplementasikan kebijakan, untuk itu Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik menetapkan program sebagai berikut :

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja keuangan
6. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

7. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
8. Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
9. Program Kerjasama Informasi dan Media Massa
10. Program Layanan e-Government
11. Program Pengelolaan Komunikasi Publik
12. Program Keamanan Informasi dan Persandian

6.1.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- 1) Penyediaan jasa surat menyurat
- 2) Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
- 3) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas
- 4) Penyediaan jasa administrasi keuangan
- 5) Penyediaan jasa kebersihan kantor
- 6) Penyediaan alat tulis kantor
- 7) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- 8) Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
- 9) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- 10) Penyediaan bahan bacaan & peraturan perundang-undangan
- 11) Penyediaan bahan logistik kantor
- 12) Penyediaan makanan dan minuman
- 13) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
- 14) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
- 15) Penyediaan jasa pendukung administrasi teknis perkantoran

6.1.2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur

- 1) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.
- 2) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional
- 3) Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
- 4) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

6.1.3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- 1) Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
- 2) Pengadaan pakaian olahraga

6.1.4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

1. Pendidikan dan Pelatihan Formal

2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

6.1.5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja keuangan

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan dan kinerja di PD
- 2) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 3) Penyusunan evaluasi kepuasan konsumen terhadap pelayanan bidang komunikasi informatika dan statistik

6.1.6. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

- 1) Penyusunan Profil Daerah
- 2) Penyusunan Statistik Sektoral Daerah

6.1.7. Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa

- 1) Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi
- 2) Optimalisasi Radio Agropolitan
- 3) Pembangunan Gedung Media Center
- 4) Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
- 5) Pengadaan Akses Internet Gratis Bagi Masyarakat (Free Wifi)
- 6) Penguatan Signal GSM dan Peralatannya
- 7) Pembangunan Taman Digital (Cyber Park)

6.1.8. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi

- 1) Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi
- 2) Bimbingan Teknis Aplikasi Teknologi Bagi Aparatur Pemerintah dan Perangkat Daerah
- 3) Pengembangan aparatur dalam bidang teknologi informasi
- 4) Edukasi internet sehat dan CAKAP bagi pelajar dan masyarakat

6.1.9. Program Kerjasama Informasi dan Media Massa

- 1) Penyebarluasan Informasi pembangunan daerah
- 2) Analisis Media

6.1.10. Program Layanan e-Government

- 1) Pembangunan Aplikasi e-Government

- 2) Pembinaan dan Pengelolaan Aplikasi e-Government
- 3) Pembangunan, Pengembangan dan Pengelolaan Website
- 4) Pembuatan Master Plan Pelaksanaan e-Government
- 5) Optimalisasi dan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)
- 6) Pengadaan Ruang LPSE dan Perlengkapannya

6.1.11. Program Pengelolaan Komunikasi Publik

- 1) Pengembangan dan Pembinaan Komunitas Informasi Masyarakat (KIM)

5.1.12. Program Keamanan Informasi dan Persandian

- 1) Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Sandi Telekomunikasi
- 2) Implementasi dan Operasional PPID

RENCANA PROGRAM PRIORITAS
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KAB. MUSI RAWAS
TAHUN 2016 - 2021

No	Kode Rekening	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Program (Outcome)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
				2016		2017		2018		2019		2020		2021	
				Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					2,259,000,000		2,891,326,000		18,599,700,000		12,268,700,000		11,622,700,000		11,610,200,000
1	1.07.1.07.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya kinerja aparatur dan pelayanan publik	-	-	25%	503,326,000	40%	1,254,700,000	50%	887,700,000	75%	887,700,000	85%	940,200,000
1.1	1.07.1.07.01.01.01.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat / paket terkirim	-	-	2 item / bahan	4,326,000	2 item / bahan	4,000,000	2 item / bahan	4,500,000	2 item / bahan	4,500,000	2 item / bahan	4,500,000
1.2	1.07.1.07.01.01.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya ketersediaan Listrik, Telpn dan PAM	-	-	7 Rekening (listrik, Tlp dan PAM)	40,000,000	5 Rekening (listrik, Tlp dan PAM)	70,000,000	5 Rekening (listrik, Tlp dan PAM)	60,000,000	5 Rekening (listrik, Tlp dan PAM)	60,000,000	5 Rekening (listrik, Tlp dan PAM)	60,000,000
1.3	1.07.1.07.01.01.06.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan yang terpelihara dan terpenuhinya perizinan kendaraan Dinas	-	-	-	-	3 Unit Kend R4	15,000,000	4 Unit R4 dan 2 Unit R2	7,500,000	4 Unit R4 dan 2 Unit R2	7,500,000	4 Unit R4 dan 4 Unit R2	10,000,000
1.4	1.07.1.07.01.01.07.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	-	-	10 Org	50,000,000	12 Org	115,700,000	12 Org	115,700,000	12 Org	115,700,000	12 Org	115,700,000
1.5	1.07.1.07.01.01.08.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah jasa retribusi yang dibayar dan ketersediaan alat-alat kebersihan kantor	-	-	1 jasa retribusi dan 17 item alat	25,000,000	1 jasa retribusi dan 17 item alat	60,000,000	1 jasa retribusi dan 17 item alat	25,000,000	1 jasa retribusi dan 17 item alat	25,000,000	1 jasa retribusi dan 17 item alat	25,000,000
1.6	1.07.1.07.01.01.10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	-	-	29 item ATK	30,000,000	29 item ATK	100,000,000	35 item ATK	75,000,000	35 item ATK	75,000,000	40 item ATK	100,000,000
1.7	1.07.1.07.01.01.11.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang cetakan dan Penggadaan	-	-	5 item brg	20,000,000	5 item brg	30,000,000	5 item brg	50,000,000	5 item brg	50,000,000	5 item brg	50,000,000
1.8	1.07.1.07.01.01.12.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya penerangan bangunan kantor	-	-	4 item bahan	30,000,000	4 item bahan	15,000,000	4 item bahan	15,000,000	4 item bahan	15,000,000	4 item bahan	15,000,000
1.9	1.07.1.07.01.01.13.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan untuk kelancaran pelayanan bagi aparatur	-	-	5 item brg	20,000,000	8 item brg	350,000,000	4 item brg	75,000,000	4 item brg	75,000,000	6 item brg	100,000,000
1.10	1.07.1.07.01.01.15.	Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan bagi aparatur	-	-	4 item buku	29,000,000	4 item buku	30,000,000	4 item buku	30,000,000	4 item buku	30,000,000	4 item buku	30,000,000
1.11	1.07.1.07.01.01.16.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya bahan - bahan logistik kantor	-	-	3 item bahan	10,000,000	3 item bahan	10,000,000	3 item bahan	10,000,000	3 item bahan	10,000,000	3 item bahan	10,000,000
1.12	1.07.1.07.01.01.17.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman bagi aparatur	-	-	-	-	3 item	-	-	50,000,000	3 item	50,000,000	3 item	50,000,000
1.13	1.07.1.07.01.01.18.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	-	-	1 Tahun	150,000,000	1 Tahun	250,000,000	1 Tahun	200,000,000	1 Tahun	200,000,000	1 Tahun	200,000,000
1.14	1.07.1.07.01.01.19.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi di dalam daerah	-	-	1 Tahun	25,000,000	1 Tahun	35,000,000	1 Tahun	50,000,000	1 Tahun	50,000,000	1 Tahun	50,000,000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.15	1.07.1.07.01.01.20.	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis / Perkantoran	Terpenuhinya jasa pendukung administrasi teknis / perkantoran	-	-	12 Org	70,000,000	12 Org	150,000,000	12 Org	100,000,000	12 Org	100,000,000	12 Org	100,000,000
	1.07.1.07.01.01.20.	Penyediaan Jasa Dokumentasi, Publikasi dan Dekorasi	Tersedianya jasa dokumentasi publikasi dan dekorasi	-	-	-	-	1 Tahun	20,000,000	1 Tahun	20,000,000	1 Tahun	20,000,000	1 Tahun	20,000,000
2	1.07.1.07.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya kelancaran tugas aparatur	-	-	20%	65,000,000	40%	1,270,000,000	60%	310,000,000	70%	320,000,000	80%	345,000,000
2.1	1.07.1.07.01.02.05	Pengadaan Kendaraan Dinas / operasional	Tersedianya Kendaraan operasional	-	-	-	-	1 Unit Rd 4 5 Unit Rd 2	500,000,000	2 Unit Rd 2	40,000,000	-	-	-	-
2.2	1.07.1.07.01.02.22.	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	-	-	1 item	25,000,000	1 Unit	75,000,000	1 item	150,000,000	1 item	175,000,000	1 item	175,000,000
2.3	1.07.1.07.01.02.24.	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas yang dapat dioperasikan	-	-	3 Unit Kend Roda 4	20,000,000	3 Unit Kend R 4	120,000,000	4 unit R4, 2 unit R2	75,000,000	4 unit R4, 2 unit R2	100,000,000	4 unit R4, 4 unit R2	125,000,000
2.4	1.07.1.07.01.02.26.	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	-	-	5 item	20,000,000	5 item	50,000,000	5 item	20,000,000	5 item	20,000,000	5 item	20,000,000
2.5	1.07.1.07.01.02.28.	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	-	-	-	-	4 item	25,000,000	4 item	25,000,000	4 item	25,000,000	4 item	25,000,000
	1.07.1.07.01.02.29.	Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi	-	-	-	-	1 Unit	500,000,000	-	-	-	-	-	-
3	1.07.1.07.01.03.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya pelayanan publik	-	-	-	-	35%	65,000,000	50%	30,000,000	65%	50,000,000	80%	60,000,000
3.1	1.07.1.07.01.03.02.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian Dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	-	-	-	-	52 Pc Pakaian Dinas Kuning Kaki	35,000,000	-	-	75 Pc Pakaian Dinas Kuning Kaki	50,000,000	-	-
3.2	1.07.1.07.01.03.06.	Pengadaan Pakaian Olah Raga	Jumlah pakaian olah raga yang diadakan	-	-	-	-	-	-	65 Pc	30,000,000	-	-	75 Pc Pakaian Olahraga + Sepatu	60,000,000
	1.07.1.07.01.03.06.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Tersedianya pakaian hari-hari tertentu	-	-	-	-	50 Pc Pakaian Seragam Khusus	30,000,000	-	-	-	-	-	-
4	1.07.1.07.01.05.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	-	-	20%	25,000,000	50%	395,000,000	60%	150,000,000	75%	125,000,000	90%	50,000,000
4.1	1.07.1.07.01.05.01.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat Pimp	-	-	-	-	1 Org Pimp II, 4 Org Pimp III, 8 Org Pimp IV	320,000,000	1 Org Pimp III, 2 Org Pimp IV	100,000,000	1 Org Pimp III, 2 Org Pimp IV	75,000,000	-	-
4.2	1.07.1.07.01.05.03.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti Bintek	-	-	5 Org	25,000,000	1 Thn	75,000,000	1 Thn	50,000,000	1 Thn	50,000,000	1 Thn	50,000,000
5	1.07.1.07.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	-	-	40%	50,000,000	55%	75,000,000	60%	75,000,000	75%	105,000,000	85%	90,000,000
5.1	1.07.1.07.01.06.01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen laporan	-	-	6 Dokumen	50,000,000	3 Dokumen	25,000,000	3 Dokumen	25,000,000	3 Dokumen	25,000,000	3 Dokumen	25,000,000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1.07.1.07.01.06.28.	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Kinerja di SKPD	Jumlah Dokumen perencanaan	-	-	-	-	3 Dokumen	25,000,000	3 Dokumen	25,000,000	3Dokumen	55,000,000	3 Dokumen	40,000,000
5.2	1.07.1.07.01.06.43.	Penyusunan Evaluasi Kepuasan Konsumen Terhadap Pelayanan Bidang Kominfo	Jumlah Dokumen hasil evaluasi kepuasan konsumen	-	-	-	-	1 Dokumen	25,000,000	1 Dokumen	25,000,000	1 Dokumen	25,000,000	1 Dokumen	25,000,000
6	1.23.1.07.01.15	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah		-	-	35%	158,000,000	55%	500,000,000	60%	500,000,000	75%	600,000,000	90%	585,000,000
6.1	1.23.1.07.01.15.01	Penyusunan Profil Daerah	Jumlah Dokumen PDRB, DDA, Video Profil Desa	-	-	3 Dokumen	133,000,000	3 Dokumen	250,000,000	3 Dokumen	250,000,000	3 Dokumen	250,000,000	3 Dokumen	250,000,000
6.2	1.23.1.07.01.15.02	Penyusunan Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen statistik daerah	-	-	1 Dokumen	25,000,000	1 Dokumen	250,000,000	1 Dokumen	250,000,000	1 Dokumen	250,000,000	1 Dokumen	250,000,000
6.3	1.23.1.07.01.15.03	Bimbingan Teknis Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Aparatur yang mengelola data statistik sektoral daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	30 Org	100,000,000	25 Org	85,000,000
7	1.25.1.07.01.15.	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Meningkatnya cakupan ketersediaan jaringan TIK	20%	2,109,000,000	25%	1,225,000,000	30%	7,540,000,000	40%	5,066,000,000	50%	4,435,000,000	65%	4,440,000,000
7.1	1.25.1.07.01.15.02.	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	Jumlah KM Jaringan Fiber Optic (FO) di Komp Perkantoran Pemkab Musi Rawas	1 kali pembinaan, Bandwch 30 Mbps dan 2 Tower	850,000,000	Bandwch 16 Mbps dan FO	500,000,000	1 KM Fiber Optic	750,000,000	1 KM Fiber Optic	750,000,000	1 KM Fiber Optic	750,000,000	1 KM Fiber Optic	750,000,000
			Jumlah Menara Triangle (Pembagi) Akses Internet utk Kec dan Desa	-	-	-	-	7 Unit Menara	560,000,000	7 Unit Menara	560,000,000	-	-	-	-
			Kapasitas Bandwith minimal utk akses internet PD/Unit Kerja/Skhl	-	-	-	-	200 Mbps	2,500,000,000	200 Mbps	2,500,000,000	200 Mbps	2,500,000,000	200 Mbps	2,500,000,000
7.2	1.25.1.07.01.15.05.	Pengadaan alat studio dan komunikasi	Tersedianya peralatan studio dan komunikasi	-	-	-	-	-	-	6 Unit HT dan 1 Unit Repeater	75,000,000	-	-	-	-
7.3	1.25.1.07.01.15.08.	Operasional Mobile Community Acces Point (M-CAP)	frekuensi operasional M-CAP	-	-	-	-	-	-	10 Kali	35,000,000	12 kali	40,000,000	15 kali	45,000,000
7.4	1.25.1.07.01.15.09.	Optimalisasi Radio Agropolitan	Meningkatnya perasional Radio	1 Tahun	200,000,000	1 Tahun	200,000,000	1 Tahun	500,000,000	1 Tahun	250,000,000	1 Tahun	250,000,000	1 Tahun	250,000,000
7.5	1.25.1.07.01.15.10	Pembangunan Gedung Media Center	Tersedianya Gedung Media Center	1 Unit (Tahap I)	1,009,000,000	1 Unit (TahapII)	500,000,000	1 Unit (TahapIII)	2,000,000,000	1 Unit	1,000,000	-	-	-	-
7.6	1.25.1.07.01.15.11.	Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	frekuensi pengawasan	216 kali	50,000,000	1 Tahun	25,000,000	110 Kali	30,000,000	110 Kali	45,000,000	110 Kali	45,000,000	110 Kali	45,000,000
7.7	1.25.1.07.01.15.12.	Pengadaan Akses Internet Gratis bagi Masyarakat (Free Wifi)	Jumlah Titik Layanan Akses Internet Gratis Bagi Masy	-	-	-	-	10 Desa	200,000,000	10 Titik	200,000,000	10 Titik	200,000,000	10 Desa	200,000,000
7.8	1.25.1.07.01.15.13.	Penguatan Signal GSM dan Peralatannya	Jumlah Desa yang mendapat penguat signal	-	-	-	-	38 Desa	500,000,000	10 Desa	150,000,000	10 Desa	150,000,000	10 Desa	150,000,000
7.9	1.25.1.07.01.15.14.	Pembangunan Taman Digital (Cyber Park)	Jumlah ruang terbuka publik yang berbasis TIK	-	-	-	-	2 Lokasi	500,000,000	2 Lokasi	500,000,000	2 Lokasi	500,000,000	2 Lokasi	500,000,000
8	1.25.1.07.01.17.	Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Meningkatnya pengetahuan SDM bidang komunikasi dan informasi	-	-	-	75,000,000	25%	750,000,000	30%	400,000,000	40%	250,000,000	55%	250,000,000
8.1	1.25.1.07.01.17.01.	Pelatihan SDM Dalam Bidang Komunikasi dan Informasi	Frekuensi pelatihan bidang komunikasi dan informasi yang dilatih	-	-	-	75,000,000	60 PD dan 186 Perangkat Desa	500,000,000	2 TIK	150,000,000	2 TIK	150,000,000	2 TIK	150,000,000
	1.25.1.07.01.17.02.	Pengembangan Aparatur dalam Bidang Teknologi Informasi	Tersedianya SDM yang handal dalam penggunaan IT	-	-	-	-	-	150,000,000	-	150,000,000	-	-	-	-
8.2	1.25.1.07.01.17.03.	Edukasi Internet CAKAP bagi Pelajar dan Masyarakat	Jumlah Pelajar dan Masyarakat yang mengikuti Edukasi	-	-	-	-	100 Org	100,000,000	100 Org	100,000,000	100 Org	100,000,000	100 Org	100,000,000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9	1.25.1.07.01.18.	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	Terwujudnya e-government dan meningkatkan distribusi informasi ke publik	-	-	25.00%	100,000,000	50%	3,800,000,000	65%	3,500,000,000	70%	3,500,000,000	80%	3,500,000,000
9.1	1.25.1.07.01.18.01.	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Intensitas sebaran informasi pembangunan daerah	-	-	Konten HUT Kab. Mura	100,000,000	10 Media Online, 10 Media Elektronik, 90 Media Cetak dan Pelaksanaan Aplk SAPA serta SMS Center	3,500,000,000	10 Media Online, 10 Media Elektronik, 90 Media Cetak dan Pelaksanaan Aplk SAPA serta SMS Center	3,500,000,000	10 Media Online, 10 Media Elektronik, 90 Media Cetak dan Pelaksanaan Aplk SAPA serta SMS Center	3,500,000,000	10 Media Online, 10 Media Elektronik, 90 Media Cetak dan Pelaksanaan Aplk SAPA serta SMS Center	3,500,000,000
9.2	1.25.1.07.01.18.02	Analisis Media	Jumlah Media yang diklarifikasi	-	-	-	-	75 Media	300,000,000	-	-	-	-	-	-
10	1.25.1.07.01.19.	Program Layanan e-Government		-	-	25%	250,000,000	30%	1,700,000,000	45%	650,000,000	60%	650,000,000	75%	650,000,000
10.1	1.25.1.07.01.19.01	Pembangunan Aplikasi e-Government	Jumlah Aplikasi yang dikelola	-	-	-	-	3 Aplikasi	400,000,000	4 Aplikasi	250,000,000	4 Aplikasi	250,000,000	4 Aplikasi	250,000,000
10.2	1.25.1.07.01.19.02	Pembinaan dan Pengelolaan Aplikasi e-Government		-	-	-	-	60 PD	200,000,000	-	-	-	-	-	-
10.3	1.25.1.07.01.19.03	Pembangunan, Pengembangan dan Pengelolaan Website	Jumlah Website Kabupaten dan PD yang dikelola	-	-	1 Website	50,000,000	1 Website Kabupaten + 32 Website PD	400,000,000	1 Website Kabupaten + 32 Website PD	150,000,000	1 Website Kabupaten + 32 Website PD	150,000,000	1 Website Kabupaten + 32 Website PD	150,000,000
17.4	1.25.1.07.01.19.04	Pembuatan Master Plan Pelaksanaan e-Government	Jumlah Dokumen Master Plan	-	-	-	-	1 Dokumen	150,000,000	-	-	-	-	-	0
17.5	1.25.1.07.01.19.05	Optimalisasi dan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	Terwujudnya proses pengadaan barang/jasa secara elektronik	-	-	1 Thn	200,000,000	1 Thn	550,000,000	1 Tahun	250,000,000	1 Tahun	250,000,000	1 Tahun	250,000,000
18	1.25.1.07.01.20.	Program Pengelolaan Komunikasi Publik		-	150,000,000	25%	360,000,000	40%	200,000,000	55%	150,000,000	60%	150,000,000	80%	150,000,000
18.1	1.25.1.07.01.20.01	Pengembangan dan Pembinaan Komunitas Informasi Masyarakat (KIM)	Jumlah Peralatan komunikasi yang diserahkan	40 Unit	150,000,000	37 Unit	160,000,000	37 Unit	200,000,000	40 Unit	150,000,000	40 Unit	150,000,000	40 Unit	150,000,000
	1.25.1.07.01.20.02	Pengadaan dan Instalasi Liquid Crystal Display (LCD)	Jumlah Peralatan Komunikasi yang tersedia	-	-	1 Set	200,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-
19	1.25.1.07.01.21.	Program Keamanan Informasi dan Persandian		-	-	35%	80,000,000	50%	1,050,000,000	65%	550,000,000	75%	550,000,000	90%	550,000,000
19.1	1.25.1.07.01.21.01	Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Sandi Telekomunikasi	Jumlah Petugas Santel, Pemeliharaan dan Koordinasi bidang persandian	-	-	1 Tahun	50,000,000	1 Tahun	200,000,000	1 Tahun	100,000,000	1 Tahun	100,000,000	1 Tahun	100,000,000
19.2	1.25.1.07.01.21.02	Implementasi dan Operasional PPID	Jumlah Pejabat PPID, Jumlah Koordinasi dan jumlah sosialisasi yang diikuti	-	-	1 Tahun	30,000,000	1 Tahun	350,000,000	1 Tahun	250,000,000	1 Tahun	250,000,000	1 Tahun	250,000,000
		Operasional Pengamanan Data dan Informasi	Jumlah koordinasi dan konsultasi bidang persandian	-	-	-	-	1 Tahun	200,000,000	1 Tahun	200,000,000	1 Tahun	200,000,000	1 Tahun	200,000,000
19.3	1.25.1.07.01.21.03	Pemutakhiran Data Pilkada (Pilgub 2018)	Data yang diperlukan dalam rangka Pilgub	-	-	-	-	1 Ls	300,000,000	-	-	-	-	-	-

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

RPJMD mempunyai kedudukan sebagai pedoman umum bagi Aparatur Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Organisasi Politik, Organisasi Sosial Kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Profesi, Lembaga Pendidikan, Dunia Usaha, Tokoh Masyarakat dan seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Musi Rawas dalam melaksanakan pembangunan daerah. Memperhatikan hal tersebut maka dokumen RPJMD Kabupaten Musi Rawas merupakan dokumen yang memiliki hubungan yang kuat dengan dokumen perencanaan lainnya. Dalam implementasinya, RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis PD yang harus disusun dalam rangka memenuhi target capaian Kinerja masing-masing PD yang berlandaskan kepada anggaran.

Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021 ini disusun dengan mengacu kepada RPJMD Kabupaten Musi Rawas untuk kurun waktu yang sama berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta berpedoman pada ketentuan lainnya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas. Untuk menghindari terjadinya tumpang tindih dalam Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan perlu dilakukan kordinasi antar lintas PD dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas sehingga pelaksanaan akan berjalan sesuai rencana, terukur dan berhasil guna kepada masyarakat. Pelaksanaan Program dan Kegiatan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Musi Rawas tidak terlepas dari berkoordinasi dengan Dinas terkait. Pelaksanaan koordinasi ini dilakukan melalui musrenbang-musrenbang dan koordinasi dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA).

Rincian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Musi Rawas dengan mengacu pada RPJMD disajikan pada tabel berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase ketersediaan Infrastruktur Jaringan untuk Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi	10	20	30	45	60	80	80
2	Jumlah Ketersediaan Data Statistik Daerah	4	4	4	4	4	4	4
3	Persentase pengelolaan Persandian dan Keamanan Informasi di Daerah	5	10	35	60	75	80	80



BUPATI MUSI RAWAS

KEPUTUSAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 67.a/KPTS/DISKOMINFO/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN PERUBAHAN RENCANA
STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KABUPATEN MUSI RAWAS
TAHUN 2016-2021

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Strategis adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- b. bahwa dikarenakan adanya perubahan nomenklatur Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas, perlu disusun dokumen perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021;
- c. bahwa untuk menyusun dokumen perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu dibentuk Tim Penyusun;
- c. bahwa Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021 sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Musi Rawas.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2018 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10);
13. Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 68);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Dokumen Perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021, dengan susunan personalianya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas:

- a. menyiapkan bahan-bahan terkait dengan penyusunan laporan Perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021;
- b. mengolah dan menyusun bahan-bahan Dokumen Perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021; dan
- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Musi Rawas melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2018, melalui anggaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Musi Rawas.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 1 FEBRUARI 2018
BUPATI MUSI RAWAS

HENDRA GUNAWAN

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektur Kabupaten Musi Rawas
2. Kepala BPKAD Kabupaten Musi Rawas
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Musi Rawas
4. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR : 167.9 /KPTS/DISKOMINFO/2018

TANGGAL : 1 FEBRUARI

2018

TIM PENYUSUN DOKUMEN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK
KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2016-2021

No	Jabatan	Nama	Keterangan
1.	Penanggungjawab	Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kab. Musi Rawas	
2.	Ketua	Sekretaris Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kab. Musi Rawas	
3.	Wakil Ketua	Martina, S.E	
4.	Sekretaris	H. Fetbon Taufik Hidayat, S.T, M.Si	
5.	Anggota	1. Drs. Ruslim 2. Depi Siswanto, S.Sos, M.Si 3. Yudhi Cahyadi, S.Kom 4. Sefri Nugroho, S.T, M.Si 5. Desy Hartaty, S.P	
6.	Operator	1. Awaludin Septian, A.Md 2. Rahmat Ramadhoni, S.Kom	
7.	Narasumber	1. Bappeda Kabupaten Musi Rawas 2. BPKAD Kabupaten Musi Rawas	

BUPATI MUSI RAWAS,

M. HENDRA GUNAWAN

BAB VIII

PENUTUP

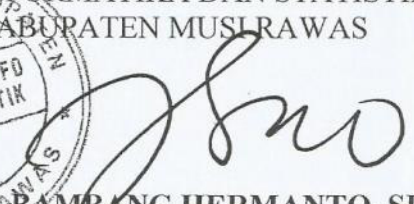
Dokumen Renstra 2016 – 2021 Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Musi Rawas ini merupakan dokumen perencanaan yang menjadi acuan bagi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik dalam rangka penyelenggaraan pelayanan komunikasi informatika dan statistik lima tahun kedepan. Dokumen ini selain berisi rencana kegiatan-kegiatan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik juga menggambarkan besarnya anggaran yang dibutuhkan. Renstra mencakup berbagai indikator kinerja yang merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian rencana yang sudah dirumuskan tersebut.

Dokumen Renstra Dinas perhubungan Komunikasi dan Informatika ini disusun dengan mempertimbangkan dan memperhitungkan berbagai faktor yang bersumber dari lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Namun demikian, hal ini tidak berarti bahwa substansi pada dokumen tersebut tidak dapat mengalami perubahan.

Muara Beliti, MARET 2018

KEPALA DINAS KOMUNIKASI
INFORMATIKA DAN STATISTIK
KABUPATEN MUSI RAWAS




H. BAMBANG HERMANTO, SE, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19620109 199003 1 003